

MITIGASI PENYELENGGARAAN HAJI: KAJIAN TERHADAP  
REKOMENDASI MUDZAKARAH PERHAJIAN DI INDONESIA



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi ( S.E)  
Program Studi Manajemen Haji dan Umrah (MHU)

Oleh :

Anggit Ikmawan Wicaksono

2001056061

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2024

## HALAMAN PERNYATAAN

### HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anggit Ikmawan Wicaksono

NIM : 2001056061

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 22 Desember 2024

Penulis

  
  
**Anggit Ikmawan Wicaksono**

**NIM. 2001056061**

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. 024 7601291 Semarang 50185


PENGESAHAN UJIAN MUNAQSAH  
SKRIPSI

MITIGASI PENYELENGGARAAN HAJI: KAJIAN TERHADAP REKOMENDASI  
MUDZAKARAH PERHAJIAN DI INDONESIA

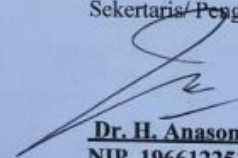
Disusun Oleh :  
Anggit Ikmalwan Wicaksono  
2001056061

Telah dipertahankan dan diujikan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal 02 Januari 2025 dan dinyatakan **LULUS MEMENUHI SYARAT**  
Guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Susunan Dewan Penguji


Ketua/ Penguji I

  
Dr. H. Abdul Razaq, M.S.I.  
NIP.198010222009011009

Sekretaris/ Penguji II

  
Dr. H. Anasom, M.Hum.  
NIP. 196612251994031004

Penguji III

  
Prof. Dr. Hj. Yuyun Affandi, Lc., M.A.  
NIP. 196006031992032002

Penguji IV

  
Dr. Hatta Abdul Malik, M.S.I.  
NIP. 198003112007101001

Disahkan Oleh  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
pada tanggal 02 Januari 2024

  
Prof. Dr. Mota Fauzi, M.Ag.  
NIP.197205171998031003

## NOTA PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. 024 7601291  
Semarang 50185

### NOTA PEMBIMBING

Lamp : 1 bendel  
Hal : Persetujuan Naskah Munaqosah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Walisongo Semarang  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa naskah munaqosah saudara :

Nama : **Anggit Ikmawan Wicaksono**  
NIM : **2001056061**  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi  
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah  
Judul : **MITIGASI PENYELENGGARAAN HAJI : KAJIAN  
TERHADAP REKOMENDASI MUDZAKARAH PERHAJIAN  
DI INDONESIA**

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan.  
Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, 10 Desember 2024

**Pembimbing**

Dr. H. Anasom, M. Hum  
NIP. 196612251994031004

## PERSEMBAHAN

Rasa syukur yang mendalam atas selesainya penelitian ini, peneliti persembahkan kepada:

1. Untuk Ibu dan Bapak, karya ini kupersembahkan untuk kalian, yang selalu menjadi pilar kekuatan dalam hidupku. Dukungan tanpa henti, doa yang tiada putus, dan nasihat bijak kalian adalah alasan saya bisa sampai di titik ini. Setiap langkah yang saya tempuh adalah berkat kerja keras, cinta, dan pengorbanan kalian. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan dan kebahagiaan kepada kalian.
2. Untuk adikku satu-satunya yang selalu menjadi penyemangatku, karya ini juga untukmu. Semoga ini bisa menjadi inspirasi agar kamu terus belajar dan bermimpi besar. Kakak ingin kamu tahu, perjalanan ini tidak mudah, tetapi sangat berharga, dan suatu hari, kakak yakin kamu akan melampaui apa yang sudah kakak capai.

## MOTTO

*“Pergi adalah caraku menciptakan rindu. Keluarlah dan lihat,  
kesulitan tidak hanya datang kepadamu”*

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, ridha, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Mitigasi Penyelenggaraan Haji: Kajian Terhadap Rekomendasi Mudzakah Perhajian di Indonesia”** ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shollallahu ‘Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabat beliau.

Skripsi ini disusun sebagai bagian dari tugas akhir dan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Strata 1 (S-1) dalam Program Studi Manajemen Haji dan Umrah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta berbagai bentuk dukungan selama proses penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih khusus ditujukan kepada:

1. Prof. Dr. H. Nizar, M. Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Moh. Fauzi, M. Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang beserta seluruh jajaran pimpinannya.
3. Bapak H. Abdul Rozaq, M. S. I selaku Ketua Jurusan Manajemen Haji dan Umrah juga selaku pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

4. 4. Bapak Mustofa Hilmi, M.Sos selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Haji dan Umrah UIN Walisongo Semarang.
5. Segenap staff yang ada di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
6. Untuk Ibu dan Bapak yang selalu memberikan dukungan dan doa di setiap langkah penulis. Berkat doa-doa tulus kalian, penulis mampu mencapai titik ini. Terima kasih atas segala doa, cinta, dan pengorbanan yang tak pernah henti kalian berikan. Dari kerja keras yang tanpa lelah hingga pelukan hangat di saat aku jatuh, semua itu menjadi kekuatan yang membawaku sampai ke titik ini.

Penulis menyadari bahwa meskipun telah banyak pihak yang memberikan bantuan, skripsi ini masih memiliki sejumlah kekurangan. Penulis memohon maaf apabila terdapat kekurangan baik dari segi isi maupun penyajiannya, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Semoga segala dukungan yang telah diberikan selama proses penyusunan karya tulis ini mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca untuk memperbaiki penulisan di masa mendatang. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Semarang, 10 Desember 2024

Penulis

Anggit Ikmawan Wicaksono

2001056061

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	i
NOTA PEMBIMBING .....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xi
ABSTRAK .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	6
C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian	6
D. TINJAUAN PUSTAKA	7
E. METODE PENELITIAN	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	10
2. Sumber penelitian	11
3. Teknik pengumpulan data	11
4. Uji Keabsahan Data	12
5. Teknik Analisis Data	12
F. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI	13
BAB II MANAJEMEN RISIKO, MITIGASI PENYELENGGARAAN HAJI DAN MITIGASI DALAM PERSPEKTIF ISLAM .....	15
A. MANAJEMEN RISIKO	15
1. Pengertian Manajemen Risiko	15
B. Mitigasi Penyelenggaraan Haji	16

1. Pengertian Tentang Mitigasi Penyelenggaraan Haji	16
C. Mitigasi dalam Perspektif Islam	18
BAB III MUDZAKARAH PERHAJIAN, GAMBARAN UMUM HASIL REKOMENDASI MUDZAKARAH PERHAJIAN 2023 DAN PROBLEMATIKA PERHAJIAN 2023.....	22
A. MUDZAKARAH PERHAJIAN	22
B. Gambaran Umum Rekomendasi Mudzakah Perhajian 2023	23
C. Problematika Kesehatan Penyelenggaraan Haji 2023	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
A. HASIL PENELITIAN REKOMENDASI MUDZAKARAH PERHAJIAN 2023	28
B. ANALISIS ISTITHA'AH KESEHATAN DALAM REKOMENDASI MUDZAKARAH PERHAJIAN 2023	30
C. Pembahasan Mudzakah Perhajian 2023	33
1. Mitigasi Penyelenggaraan Haji Hasil Rekomendasi Mudzakah Perhajian 2023	33
2. Relevansi Rekomendasi Mudzakah Perhajian 2023 dengan Tantangan Kontemporer Penyelenggaraan Haji	40
3. Kendala Penerapan Rekomendasi Mudzakah Perhajian 2023	44
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA.....	49

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Siklus penanggulangan bencana dalam perspektif Islam .....	20
Gambar 4.1 Pembacaan 9 Rekomendasi Mudzakah 2023 .....	29
Gambar 4.2 Program Haji Ramah Lansia 2023.....	34
Gambar 4.3 Alur Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Haji 2023 .....	38

## ABSTRAK

Anggit Ikmawan Wicaksono, 2024. Mitigasi Penyelenggaraan Haji: Kajian Terhadap Rekomendasi Mudzakah Perhajian di Indonesia. Skripsi : Program Studi Manajemen Haji dan Umrah, UIN Walisongo Semarang.

Mudzakah Perhajian adalah forum diskusi rutin yang bertujuan mengevaluasi dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia, khususnya dalam pelayanan, kesehatan, dan koordinasi antar lembaga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan untuk mengevaluasi relevansi dan implementasi rekomendasi tersebut. Data diperoleh melalui sumber primer dan sekunder, seperti jurnal, tesis, skripsi, dan dokumen pendukung lainnya, yang kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mitigasi penyelenggaraan haji 2023 meliputi penyediaan layanan Haji Ramah Lansia, penguatan sistem kesehatan jamaah, dan optimalisasi teknologi. Rekomendasi Mudzakah Perhajian 2023 memiliki relevansi signifikan dalam menjawab tantangan kontemporer melalui peningkatan infrastruktur, kualitas pelayanan, dan penggunaan teknologi. Namun, kendala seperti keterbatasan kuota, infrastruktur, dan koordinasi masih menjadi tantangan utama. Dengan kolaborasi lintas sektor dan adaptasi terhadap perkembangan zaman, rekomendasi ini dapat meningkatkan kenyamanan, keselamatan, dan kepuasan jamaah. Penelitian ini memberikan kontribusi untuk merumuskan kebijakan penyelenggaraan haji yang lebih inklusif, efisien, dan berkelanjutan.

**Kata Kunci :** Mudzakah Perhajian 2023, Mitigasi Penyelenggaraan Haji, Relevansi Tantangan Kontemporer

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Haji adalah perjalanan menuju Baitullah (Ka'bah) untuk melaksanakan serangkaian ibadah seperti ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, serta amalan lainnya pada waktu tertentu sebagai bentuk ketaatan dan memenuhi panggilan Allah SWT.<sup>1</sup> Sebagai salah satu rukun Islam yang kelima, haji menjadi kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu dari segi finansial, kesehatan fisik, serta memiliki jaminan keamanan, dan harus dilaksanakan setidaknya sekali dalam hidup.<sup>2</sup> Di Indonesia, kewajiban ini memiliki relevansi yang besar mengingat mayoritas penduduknya adalah Muslim. Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, menurut laporan "Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslim 2024" oleh Royal Islamic Strategic Research Center (RISSC). Dengan 240,62 juta Muslim pada tahun 2023, itu setara 86,7 persen dari 277,53 juta orang yang tinggal di negara ini.<sup>3</sup> Sisa dari populasi dibentuk oleh agama-agama lain, seperti Kristen, Hindu, Buddha, dan agama lainnya, dengan mayoritas Kristen menjadi kelompok terbesar setelah Muslim. Akibatnya, dibandingkan dengan negara lain, jumlah orang Indonesia yang menunaikan ibadah haji setiap tahunnya cukup tinggi. Laporan databoks tahun 2023 menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara dengan kuota haji terbanyak.<sup>4</sup>

Pada tahun 2023, populasi Indonesia adalah 221.000, tetapi telah meningkat sebanyak 8.000 hingga 229.000, menurut Duta Besar Indonesia ke

---

<sup>1</sup> Yuyun Affandi, *Haji Bagi Generasi Milenial-Paradigma Tafsir Tematik* (Semarang: Fatawa Publishing, 2021).

<sup>2</sup> Ahmad Kartono, *Solusi Hukum Manasik Dalam Permasalahan Ibadah Haji Menurut Empat Mazhab* (Jakarta: Pustaka Cendekiamuda., 2016).

<sup>3</sup> Cindy Mutia Annur, "10 Negara Dengan Populasi Muslim Terbanyak Dunia 2023, Indonesia Memimpin!," databoks, 2023, [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia-memimpin#:~:text=RISSC mencatat%20jumlah populasi muslim,totalnya 277%2053 juta jiwa](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia-memimpin#:~:text=RISSC%20jumlah%20populasi%20muslim,totalnya%20277%2053%20juta%20jiwa).

<sup>4</sup> Cindy Mutia Annur, "Inilah 10 Negara Dengan Kuota Haji Terbanyak 2023, Indonesia Peringkat Teratas," databoks, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/06/inilah-10-negara-dengan-kuota-haji-terbanyak-2023-indonesia-peringkat-teratas>.

Saudi Arabia, Abdul Aziz Ahmad.<sup>5</sup> Pada tahun 2022, Indonesia juga menerima kuota haji sebesar 100.051, hanya sekitar 46% dari kuota tahun sebelumnya.<sup>6</sup> Meskipun Indonesia memiliki kuota jamaah haji tertinggi di dunia, waktu tunggu haji terlama di Indonesia adalah 47 tahun, dengan rata-rata 31 hingga 32 tahun.<sup>7</sup> Artinya mayoritas jamaah haji dari Indonesia didominasi oleh kelompok usia yang lebih tua.

Pada tahun 2022, 41.239 jemaah haji Indonesia berusia 50-59 tahun, atau 44,5% dari 92.668 jemaah haji Indonesia pada tahun sebelumnya<sup>8</sup>. Isu kesehatan terkait cuaca panas juga menjadi perhatian karena jumlah jemaah haji yang lebih tua menghadapi tantangan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tingkat kemajuan jamaah haji di Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di Makkah menunjukkan hal ini. Menurut Hilman, banyak jamaah haji yang dirawat karena penyakit komorbid seperti hipertensi dan diabetes yang kambuh akibat kelelahan dan kurangnya kebiasaan makan, yang membutuhkan pemulihan yang lama.

Wakil ketua komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengungkapkan, menurut tempo.co beberapa masalah yang dikeluhkan jamaah terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022. Untuk memulai, layanan Armuzna masih belum memenuhi janjinya. Kedua, tenda di Mina masih jauh dari jamarah. Ketiga, dalam hal kesehatan, beberapa fasilitas kesehatan masih memiliki rekam medis pasien tahun 2020 yang belum diperbaharui. Dengan

---

<sup>5</sup> Meigitaria Sanita, "Masa Tunggu Haji Di Indonesia Mencapai 47 Tahun, Alhasil Usia Tua Mendominasi Hingga Ada Yang Terpaksa Dipulangkan," universitas Islam Indonesia, 2023, <https://communication.uui.ac.id/masa-tunggu-haji-di-indonesia-mencapai-47-tahun-alhasil-usia-tua-mendominasi-hingga-ada-yang-terpaksa-dipulangkan/#:~:text=Berdasarkan data dari Kemenag RI,yang datang ke Tanah Suci.>

<sup>6</sup> Finaka, "Kuota Haji Indonesia Tahun Ke Tahun," Indonesiabaik.id, accessed November 28, 2024, <https://indonesiabaik.id/infografis/kuota-haji-indonesia-tahun-ke-tahun.>

<sup>7</sup> Sanita, "Masa Tunggu Haji Di Indonesia Mencapai 47 Tahun, Alhasil Usia Tua Mendominasi Hingga Ada Yang Terpaksa Dipulangkan."

<sup>8</sup> Cindy Mutia Annur, "Jumlah Jemaah Haji Indonesia Didominasi Usia Di Atas 50-59 Tahun, Berikut Trennya Lima Tahun Terakhir," databooks, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/19/jumlah-jemaah-haji-indonesia-didominasi-usia-di-atas-50-59-tahun-berikut-trennya-lima-tahun-terakhir.>

demikian, tenaga kesehatan masih menggunakan rekam medis tahun 2020. Keempat, pelayanan manasik haji para jamaah harus ditingkatkan. Kelima, banyak jamaah yang tidak tergabung dalam kelompok bersama Ibadah Haji (KBIH) tidak tahu cara menjalankan manasiknya. Pihak yang berwenang harus memperhatikan masalah teknis seperti koper jamaah yang rusak dan sobek dengan cepat. Selain itu, dia menilai masalah lain yang perlu diselesaikan, seperti sengkabut Haji Furoda.<sup>9</sup>

Selain itu, Kementerian Agama mengadakan Forum Mudzakah Perhajian untuk membahas masalah yang mungkin muncul di masa depan dengan penyelenggaraan ibadah haji. Kata "mudzakah", atau "muzakah", atau "mu·za·ka·rah", dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti berbagi pendapat tentang suatu masalah. atau, dengan kata lain, diskusi.<sup>10</sup> Namun, dalam konteks mudzakah perhajian, itu berarti pertemuan atau wacana yang diadakan oleh Kementerian Agama Indonesia untuk membahas berbagai masalah yang mungkin muncul dalam penyelenggaraan ibadah haji<sup>11</sup>. Forum ini mengumpulkan banyak pemangku kepentingan untuk berbicara tentang tantangan masa depan penyelenggaraan ibadah haji.

Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan inklusivitas penyelenggaraan ibadah haji, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Hilman Latief, memberikan keterangan resmi di Jakarta, Jumat. Regulasi antarnegara, atau regulasi antarnegara, adalah salah satu masalah utama yang dihadapi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, regulasi adalah pengaturan<sup>12</sup>, sedangkan regulasi antarnegara (*interstate regulations*) yaitu

---

<sup>9</sup> "DPR Ungkap Sejumlah Kekurangan Penyelenggaraan Haji 2022," tempo.co, 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1611710/dpr-ungkap-sejumlah-kekurangan-penyelenggaraan-haji-2022>.

<sup>10</sup> Lisma Noviani, "Arti Mudzakah Adalah, Istilah Islam Yang Digunakan Dalam Musyawarah Atau Diskusi Berikut Jenisnya," accessed March 14, 2024, <https://sumsel.tribunnews.com/2023/01/03/arti-mudzakah-adalah-istilah-islam-yang-digunakan-dalam-musyawah-atau-diskusi-berikut-jenisnya>.

<sup>11</sup> Asep Firmansyah, "Kemenag Gelar Mudzakah Bahas Tantangan Penyelenggaraan Ibadah Haji," antaranews.com, accessed March 14, 2024, <https://www.antaranews.com/berita/3150673/kemenag-gelar-mudzakah-bahas-tantangan-penyelenggaraan-ibadah-haji>.

<sup>12</sup> Super User, *REGULASI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA BESERTA ASAS-ASAS PEMBENTUKANNYA*, ed. S. Rahmi Herawati (pengadilan

aturan-aturan yang ditetapkan oleh negara-negara untuk mengatur hubungan dan interaksi antara mereka. Regulasi antarnegara perlu dihadapi karena memerlukan kompromi agar penyelenggaraan ibadah haji bisa berjalan lancar. Hal ini menjadi fokus diskusi dalam forum tersebut, di mana masukan dari berbagai pihak diharapkan dapat membantu merumuskan solusi terbaik, terutama terkait pembiayaan yang memadai.

Selain itu masalah kuota jamaah dan pembiayaannya, serta upaya untuk menyediakan pembiayaan haji yang inklusif tanpa memberatkan jamaah, juga menjadi perhatian dalam forum ini. Lembaga seperti Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Direktur Pelayanan Haji, perwakilan Ormas Islam, dan akademisi harus berpartisipasi dalam penyelesaian masalah ini, menurut Hilman Latief. Selain itu, forum ini bertujuan untuk meningkatkan nilai manfaat BPKH agar jamaah lebih siap secara finansial untuk menjalani ibadah haji. Tujuan akhir dari forum ini adalah untuk mengembangkan konsep pembiayaan haji yang adil sehingga jamaah mendapatkan layanan terbaik.

Forum ini akan membahas masalah kenaikan beberapa paket layanan haji di Arab Saudi dan masalah internal terkait penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Arsad Hidayat, Direktur Bina Haji Kementerian Agama, hal ini sangat penting karena berdampak pada kelangsungan ibadah haji. Diskusi ini menjadi langkah awal sebelum dilaksanakannya Mudzakah Perhajian Tingkat Nasional, yang diharapkan dapat memberikan arah yang lebih jelas dalam penyelenggaraan ibadah haji ke depan.<sup>13</sup>

Meskipun memiliki catatan disetiap penyelenggaraannya, namun pelaksanaan kewajiban ini menjadi momen penting spiritual disetiap tahunnya,. Penyelenggaraan haji juga memunculkan sejumlah tantangan yang melibatkan aspek kesehatan, keamanan, dan logistik. Negara dengan jumlah jamaah haji terbesar di dunia adalah Indonesia, studi tentang rekomendasi mudzakah perhajian menjadi semakin relevan dalam konteks ini karena memberikan

---

agama tanjung pati.), accessed March 4, 2024, <http://ebookregulasi.patanjungpati.go.id/index.php/66-halaman-depan/1-regulasi>.

<sup>13</sup> Asep Firmansyah, "Kemenag Gelar Mudzakah Bahas Tantangan Penyelenggaraan Ibadah Haji."

perspektif dan solusi untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pelaksanaan ibadah haji. Dengan memahami tantangan yang dihadapi serta upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, dapat lebih mempersiapkan diri dalam menyelenggarakan ibadah haji yang aman, efisien, dan bermakna.

Oleh karena itu, upaya mitigasi atau pengurangan risiko dalam penyelenggaraan haji menjadi esensial. Dalam rumusan rekomendasi mudzakarah perhajian tahun 2023 yogyakarta menyebutkan 8 poin penting mengenai rekomendasi perhajian. Rekomendasi tersebut mencakup istitha'ah kesehatan, yang diperlukan untuk membayar biaya perjalanan ibadah haji dan diharapkan dapat ditanggung oleh BPJS untuk pemeriksaan kesehatan jemaah haji, merumuskan regulasi pedoman pelunasan yang mengatur tentang istitha'ah kesehatan, menambahkan pemeriksaan kesehatan jiwa kognitif dan kesehatan aktivitas sehari-hari dalam pemeriksaan istitha'ah kesehatan, meningkatkan penggunaan Siskohatkes dalam penetapan istitha'ah kesehatan Jemaah Haji, memberi tahu orang lain tentang istitha'ah kesehatan melalui penyuluhan kesehatan dan bimbingan manasik haji yang konsisten; Buku panuduan bimbingan manasik haji Kementerian Agama mencakup informasi tentang istitha'ah kesehatan dan fiqih haji untuk orang tua; dan lembaga kabupaten/kota yang bertanggung jawab untuk memberikan petunjuk kepada jamaah haji yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk istitha'ah kesehatan.

Dengan adanya 8 poin penting tersebut diharapkan pelaksanaan ibadah haji tahun berikutnya lebih maksimal dibandingkan dengan tahun ini. Lalu penelitian ini akan mengkaji hasil rekomendasi Mudzakarah perhajian 2023 dan relevansi rekomendasi yang diberikan oleh forum mudzakarah perhajian melalui pendekatan studi pustaka. Evaluasi ini akan dilakukan dengan menelaah literatur dan laporan terkini tentang penyelenggaraan haji, serta melihat implementasi dari rekomendasi tersebut dalam konteks tantangan yang dihadapi jamaah Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan guna meningkatkan penyelenggaraan ibadah haji di

masa depan, terutama dalam hal kesehatan, logistik, dan manajemen jamaah lansia.

## B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan mitigasi penyelenggaraan haji hasil rekomendasi berdasarkan Mudzakarah perhajian 2023?
2. Apakah rekomendasi mitigasi yang dihasilkan dari Mudzakarah Perhajian 2023 masih relevan dengan tantangan kontemporer dalam penyelenggaraan haji 2024?
3. Apa saja kendala utama dalam penerapan rekomendasi Mudzakarah Perhajian 2023?

## C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Diharapkan bahwa penelitian ini dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh penulis. Tujuan penelitian ini meliputi:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Mendeskripsikan dan menganalisis mitigasi penyelenggaraan haji hasil rekomendasi Mudzakarah perhajian 2023.
  - b. Mengidentifikasi relevansi rekomendasi mitigasi dengan tantangan kontemporer dalam penyelenggaraan haji.
  - c. Mengidentifikasi kendala utama dalam penerapan rekomendasi Mudzakarah Perhajian 2023?
2. Manfaat Penelitian
  - a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan untuk menambah jumlah penelitian yang telah dilakukan tentang cara mengurangi risiko kesehatan, logistik, dan keselamatan yang terkait dengan acara berskala besar. Selain itu, hasilnya akan membantu mengembangkan teori kebijakan publik, khususnya tentang manajemen risiko dalam penyelenggaraan acara keagamaan massal seperti haji. Dengan mengkaji relevansi rekomendasi dari forum mudzakah perhajian, penelitian ini dapat memperdalam pemahaman tentang bagaimana kebijakan publik dapat beradaptasi terhadap tantangan dan perubahan kebutuhan jamaah di era kontemporer.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan membantu pemangku kepentingan menilai, terutama untuk membantu mengembangkan strategi mitigasi risiko yang lebih responsif dan sesuai dengan dinamika penyelenggaraan haji. Selain itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan berfungsi sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji melalui penerapan kebijakan yang lebih baik untuk mitigasi masalah dan manajemen operasional yang lebih baik, sehingga dapat lebih efisien dalam menangani permasalahan kesehatan, logistik, dan keamanan jamaah.

D. TINJAUAN PUSTAKA

Untuk menghindari kesamaan dengan penelitian lain dan plagiasi, Penulis membahas temuan penelitian sebelumnya tentang topik ini, termasuk :

Studi pertama dilakukan oleh Albab, U. dan Al Ami, B. (2021). Problem yang Ada dengan Pelaksanaan Badal Haji di Indonesia Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana badal haji diterapkan dan masalah yang terkait dengannya di Indonesia. Data yang dikumpulkan melalui

metode penelitian kepustakaan menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan haji badal terdiri dari beberapa langkah, yaitu menentukan jumlah jamaah yang akan dibadalkan, memilih sumber dana, mempekerjakan petugas yang bertanggung jawab untuk melaksanakan haji, dan memverifikasi bahwa jamaah yang dibadalkan dipilih. Ulama berbeda pendapat tentang hukum badal haji berdasarkan dasar hukum yang berbeda. Menurut ulama Maliki, menyewa orang untuk melaksanakan ibadah haji adalah makruh karena uang hanya digunakan untuk mengajarkan Alquran. Menurut Mazhab Syafi'i, orang yang tua atau sakit sehingga tidak dapat duduk di kendaraan haji boleh menghajikan orang lain. Namun, ulama Haanfi berpendapat bahwa orang yang sakit atau mengalami kondisi badanya tidak dapat melakukan ibadah haji, tetapi jika mereka memiliki harta atau biaya untuk melakukannya, maka mereka harus melakukannya. Namun, masalah yang dihadapi badal haji dapat dibagi menjadi beberapa subtopik yang masih belum diselesaikan, seperti masalah yang dihadapi jamaah yang dibadal hajikan, masalah pendataan petugas pelaksana haji, dan masalah akad yang dihadapi badal haji.

Selanjutnya, karya Adriana Amal, A., Hidayah, N., Rauf, S., dan Wahyuningsih, S. (2022). Studi ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana perawat menangani konflik di ruang rawat inap RSUD Haji Makassar. Metode fenomenologi digunakan dalam penelitian kualitatif ini untuk menyelidiki strategi perawat untuk menangani konflik. Enam perawat memberikan data untuk penelitian ini. Data dikumpulkan melalui wawancara sistematis dengan perawat. Selain itu, data yang dikumpulkan diperiksa secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga telah menerapkan dua pendekatan untuk mengurangi konflik di ruang rawat inap: pendekatan sikap, yang menekankan peningkatan kemampuan berkomunikasi, dan pendekatan keterampilan, yang menekankan peningkatan disiplin, saran, dan masukan. Kesimpulan utama dari studi ini adalah bahwa lembaga telah menerapkan berbagai pendekatan untuk mengurangi konflik di ruang rawat inap, yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah apa pun yang terjadi di sana.

Ketiga, penelitian ini dilakukan oleh Anjani, Subriadi, AP, Hedyanti, dan Kom. S. (2015) tentang menemukan, menilai, dan mengurangi risiko keamanan informasi pada sistem rekam medis elektronik (EMR). Dengan menggunakan aplikasi Healthy Plus sebagai sistem rekam medis elektronik (EMR) di Rumah Sakit Umum, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengurangi risiko yang terkait. Selama proses ini, banyak tantangan dan hambatan yang menghalangi operasional rumah sakit. Penelitian ini menggunakan metodologi OCTAVE. Metode analisis risiko OCTAVE digunakan dalam penelitian ini. Metode ini dirancang untuk meningkatkan evaluasi risiko dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan dan perlindungan sumber daya informasi. Penelitian ini terutama bertujuan untuk menemukan solusi untuk masalah yang mungkin muncul dengan aplikasi Healthy Plus di RSUD Haji Surabaya. Tujuan penelitian ini juga adalah untuk membuat dokumen mitigasi risiko yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk menyelesaikan masalah yang muncul dengan sistem EMR di RSUD Haji Surabaya.

Pada tahun 2020, Rahmawati, N., dan Tenriajeng, A. T. melakukan penelitian keempat yang berjudul Analisis Manajemen Risiko untuk Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol (Studi Kasus: Proyek Pembangunan Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi semua risiko proyek karena teknik sipil termasuk risiko teknis, lingkungan, dan ekonomi. Dengan meminta dua puluh orang dari berbagai pihak, seperti kontraktor, konsultan, dan pemilik proyek, ditemukan bahwa risiko teknis dengan dampak terbesar dan risiko terbesar adalah kurangnya pasokan material timbunan dan kurangnya ketersediaan gambar desain. Selama pelaksanaan proyek, kenaikan harga bahan bakar dan inflasi adalah salah satu risiko ekonomi yang paling mungkin dan berdampak terbesar. Inflasi termasuk dalam kategori risiko tinggi, sedangkan kenaikan harga bahan bakar termasuk dalam kategori risiko ekstrim.

Penelitian kelima ditulis oleh Ering M. (2020), "Gereja Rumah di Masa Pandemi Covid-19: Manajemen Risiko dan Mitigasi Bencana Non Alam."

Dengan menggunakan metodologi kualitatif, penelitian ini menyelidiki bagaimana konsep gereja rumah diterapkan selama pandemi COVID-19 di GMIM Pniel Watulambot Wilayah Tondano Lima. Empat anggota jemaat, yang disurvei melalui penelitian literatur dan wawancara mendalam, dilibatkan dalam penelitian ini. Studi menunjukkan bahwa gereja rumah telah membantu menangani bahaya dan bencana non-alam, mengatasi masalah sosial, dan menumbuhkan iman keluarga. Sejak lama, rumah telah dianggap sebagai tempat intim antara Tuhan dan manusia, dan rumah secara alami digunakan untuk membangun iman. Konsep gereja rumah bukanlah ide baru. Sangat penting untuk mempertahankan identitas ibadah gereja rumah karena dianggap bermanfaat untuk meningkatkan hubungan spiritual dengan Tuhan dan anggota keluarga.

Studi sebelumnya tidak melihat rekomendasi mudzakah perhajian di Indonesia, tetapi penelitian ini sejalan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis mengenai upaya mitigasi dalam penyelenggaraan ibadah haji.

## E. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Studi pustaka, juga dikenal sebagai studi kepustakaan, adalah upaya untuk mengumpulkan informasi tentang topik atau masalah yang menjadi subjek penelitian. Penelitian kualitatif dan kepustakaan yang dikombinasikan dapat meningkatkan pemahaman tentang bagaimana rekomendasi perhajian digunakan dan diterima oleh pemangku kepentingan terkait.<sup>14</sup>

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Rekomendasi Mudzakah Perhajian yang dilaksanakan di Yogyakarta, Indonesia. Fokus

---

<sup>14</sup> Yusuf Abdhul Azis, "Studi Pustaka: Pengertian, Tujuan, Sumber Dan Metode," deepublish store, 2023, <https://deepublishstore.com/blog/studi-pustaka/>.

penelitian adalah pada penyelenggaraan ibadah haji sebagai konteks di mana rekomendasi tersebut diterapkan atau diimplementasikan. Subjek penelitian adalah bagaimana rekomendasi tersebut mempengaruhi atau berinteraksi dengan berbagai aspek penyelenggaraan haji di Indonesia, termasuk dampaknya terhadap kebijakan, manajemen risiko, serta mitigasi yang dilakukan untuk menghadapi tantangan dalam penyelenggaraan haji.

## **2. Sumber penelitian**

Untuk penelitian ini, sumber dan jenis data yang digunakan sangat penting untuk menyelidiki dan memahami fenomena yang diteliti. Dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **a. Sumber Data Primer**

Data yang langsung diperoleh dari sumber awal peneliti.<sup>15</sup> Data ini diambil secara langsung dari sumber utama peneliti. Dalam penelitian ini, sumber utamanya yaitu hasil rekomendasi mudzakah perhajian tahun 2023.

### **b. Sumber Data Sekunder**

Data yang dikumpulkan untuk tujuan lain selain menyelesaikan masalah yang diteliti.<sup>16</sup> Jurnal, tesis, skripsi, pihak-pihak penyelenggara ibadah haji dan dokumen pendukung lainnya adalah sumber data sekunder dari penelitian ini.

## **3. Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh informasi atau materi yang diperlukan dalam penelitian.<sup>17</sup> Penelitian ini mengumpulkan data dari metode dokumentasi, yang mana

---

<sup>15</sup> Hanung Hanindita and Ana Irhandayaningsih, "PERSEPSI PUSTAKAWAN PADA FUNGSI HUMAS DI PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI (Studi Kasus UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro)," *Jurnal Ilmu Perpustakaan* 6, no. 3 (2017): 261–70, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/view/23156>.

<sup>16</sup> Hanindita and Irhandayaningsih.

<sup>17</sup> "Teknik Pengumpulan Data: Arti, Proses, Dan Jenis Data," September 26, 2022, <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/teknik-pengumpulan-data-arti-proses-dan-jenis-data/>.

mencari data atau objek seperti catatan, buku, makalah, artikel jurnal, dan sebagainya.

#### **4. Uji Keabsahan Data**

Metode triangulasi sumber data digunakan untuk menguji validitas data. Metode penelitian ini meliputi mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti laporan penelitian, buku, jurnal ilmiah, dan catatan.<sup>18</sup> Hal ini dilakukan agar mengurangi ketidakjelasan informasi yang didapatkan selama melakukan penelitian.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Analisis data digunakan untuk menggabungkan temuan penelitian ke dalam data, sehingga sifat atau karakteristik data dapat dipahami dengan mudah dan bermanfaat untuk memecahkan masalah penelitian. Data analisis adalah proses menyusunnya secara sistematis dan membuatnya mudah dikelompokkan dalam uraian, yang membuatnya lebih mudah untuk memilih mana yang akan dipelajari dan diambil saat membuat kesimpulan. Peneliti ini menganalisis data yang dikumpulkan bersamaan dengan pengumpulan hingga selesai dengan menggunakan model Miles dan Huberman. Teknik untuk menganalisis data dengan model ini yaitu :

##### **a. Reduksi data**

Data dikurangi untuk memilih subjek penelitian yang sesuai dengan diskusi penelitian sebelumnya. Ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang data yang akan dikumpulkan untuk pengumpulan data tambahan<sup>19</sup>. Untuk memilih topik yang relevan dengan pembahasan penelitian yang sudah ditentukan, reduksi data dilakukan. Ini memberikan gambaran yang lebih baik tentang data yang akan dikumpulkan untuk pengumpulan data tambahan.

##### **b. Penyajian data**

---

<sup>18</sup> Rebecca Hughes, "Metode Penelitian," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2008): 287.

<sup>19</sup> Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1998).

Penyajian data dilakukan untuk memudahkan pemahaman dari data yang akan diperoleh dengan menyajikannya dalam bentuk teks naratif maupun uraian tabel. Penyajian data dalam bentuk tersebut digunakan agar lebih mudah untuk dipahami pola penelitian yang dilakukan.<sup>20</sup>

c. Penarikan kesimpulan

Akhir dari analisis data adalah penarikan kesimpulan. Tahap ini digunakan untuk lebih memperjelas hasil dari kumpulan data yang diperoleh di lapangan.

## F. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Skripsi ini akan disusun dalam lima bagian, yang akan membantu orang memahaminya, antara lain :

**BAB I** : Pendahuluan

Bab ini membahas latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan keuntungan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Penjelasan yang diberikan dalam bab ini akan membantu proses penelitian.

**BAB II** : Kajian Teori

Bab ini membahas teori-teori yang secara umum mendukung pengurangan penyelenggaraan haji, seperti teori mitigasi risiko, teori perubahan kebijakan, dan teori manajemen ibadah haji.

**BAB III** : Gambaran Umum Terkait Data Penelitian

Bab ini menguraikan mengenai problematika penyelenggaraan haji tahun 2023 serta gambaran umum hasil rekomendasi mudzakah perhajian tahun 2023

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010).

**BAB IV : Analisis dan Hasil Penelitian**

Bab ini berisi mengenai analisis mengenai serta relevansi rekomendasi Mudzakarah Perhajian dalam upaya mitigasi risiko penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia, serta mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan rekomendasi Mudzakarah perhajian

**BAB VI : Penutup**

Bab ini berisi mengenai kesimpulan yang diuraikan oleh peneliti berdasarkan analisis penelitian. Kemudian berisi saran-saran, penutup serta daftar pustaka dan lampiran yang digunakan di dalam penelitian.

BAB II  
MANAJEMEN RISIKO, MITIGASI PENYELENGGARAAN HAJI DAN MITIGASI  
DALAM PERSPEKTIF ISLAM

**A. MANAJEMEN RISIKO**

**1. Pengertian Manajemen Risiko**

Strategi manajemen risiko bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan mengelola potensi bahaya yang dihadapi organisasi<sup>21</sup>. Djohanputro<sup>22</sup> menyatakan bahwa manajemen risiko adalah "Proses yang terorganisir dan sistematis untuk mengidentifikasi, mengukur, memetakan, merancang alternatif penanganan risiko, serta memantau dan mengendalikan penerapan solusi risiko".

Didasarkan pada definisi ini, manajemen risiko adalah teknik untuk mengelola ancaman secara teratur dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan. Tugas-tugasnya meliputi identifikasi risiko, pengukuran dan pemetaan risiko, pengembangan alternatif penanganan risiko, serta monitoring dan pengendalian implementasi solusi risiko. Proses ini membantu entitas untuk mengantisipasi ancaman, mengurangi dampak negatif, dan memaksimalkan peluang, sehingga mendukung pencapaian tujuan perusahaan secara efektif.

Proses manajemen risiko adalah aspek yang lebih penting. Hanafi (2016)<sup>23</sup> mengatakan bahwa banyak orang membagi proses manajemen menjadi tiga bagian: *planning, execution, and evaluation*. Ini juga

---

<sup>21</sup> Veronika Frisda Anintya et al., "Evaluasi, Perubahan Dan Kontinuitas Kebijakan: Studi Kasus Kebijakan Pilkada Serentak 2020 Di Bandar Lampung," *Jurnal Studi Ilmu Sosial Dan Politik* 1, no. 1 (2021): 1–20, <https://doi.org/10.35912/jasispol.v1i1.160>.

<sup>22</sup> Bramantyo Djohanputro, "Manajemen Risiko Korporat," 2008, 43, [https://idfood.co.id/assets/uploads/document/MANAJEMEN\\_RISIKO\\_KORPORAT.pdf](https://idfood.co.id/assets/uploads/document/MANAJEMEN_RISIKO_KORPORAT.pdf).

<sup>23</sup> Mamduh M Hanafi, *Modul Risiko, Proses Manajemen Risiko, Dan Enterprise Risk Management, Universitas Terbuka*, 2016.

berlaku untuk proses manajemen risiko, yang mencakup planning, execution, and evaluation.

a. Menentukan tujuan, visi, dan misi adalah tempat perencanaan manajemen risiko dimulai. Selanjutnya penetapan target, kebijakan, dan prosedur terkait risiko menjadi bagian integral dari perencanaan ini. Menuliskan visi, misi, kebijakan, dan prosedur dapat memudahkan pengarahannya dan menegaskan dukungan manajemen

b. Menentukan tujuan, visi, dan misi adalah langkah pertama dalam perencanaan manajemen risiko. Bagian selanjutnya akan membahas lebih detail mengenai identifikasi, pengukuran, dan manajemen risiko. Organisasi dan personel ini dengan struktur organisasi risiko manajemen yang bervariasi antar organisasi.

c. Pengendalian, langkah selanjutnya yaitu pengendalian yang mencakup penilaian berkala terhadap penerapan risiko manajemen, analisis laporan yang dihasilkan, dan penerimaan umpan balik. Format pelaporan manajemen risiko bervariasi sesuai dengan perbedaan antar organisasi dan kegiatan yang dilibatkan.

## **B. Mitigasi Penyelenggaraan Haji**

### **1. Pengertian Tentang Mitigasi Penyelenggaraan Haji**

Mitigasi untuk mengurangi dampak yang mungkin terjadi di masa depan, penyelenggaraan haji melibatkan mitigasi, yang dapat berupa pembangunan infrastruktur fisik dan meningkatkan kesadaran dan kemampuan jemaah tentang berbagai bahaya yang mungkin terjadi.<sup>24</sup> Mitigasi yang dilakukan mencakup aspek fisik dan nonfisik, yang harus saling melengkapi dengan mempertimbangkan faktor lingkungan,

---

<sup>24</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana” (n.d.).

sosial, dan budaya. Pelaksanaannya memerlukan koordinasi dari berbagai lembaga terkait untuk memastikan upaya mitigasi dapat diterapkan dengan baik.<sup>25</sup>

Hal ini sesuai dengan Hyogo Framework for Action (HFA) 2005–2015: Building the Resilience of Nations and Communities to Disaster, yang merupakan kerangka tindakan PBB untuk mitigasi bencana. HFA ini menekankan betapa pentingnya memasukkan langkah-langkah untuk mengurangi dampak bencana ke dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan. Struktur ini bertujuan untuk mengurangi kerentanan melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan.<sup>26</sup> Pemerintah Indonesia bertanggung jawab penuh atas proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan haji, dalam hal penyelenggaraan haji, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi.<sup>27</sup>

Rekomendasi Mudzakah Perhajian 2023, yang dilaksanakan di Yogyakarta, 23-25 Oktober 2023, memberikan arahan terkait mitigasi dalam penyelenggaraan haji. Rekomendasi ini menekankan bahwa pemerintah, khususnya Ditjen PHU Kementerian Agama, harus terus bekerja sama dengan Pemerintah Arab Saudi untuk mendapatkan data kuota haji yang akurat, peraturan terbaru, dan tindakan pencegahan yang diperlukan.

Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji relevansi rekomendasi Mudzakah Perhajian tersebut dalam menghadapi tantangan kontemporer penyelenggaraan haji, serta mengevaluasi langkah-langkah mitigasi yang telah diusulkan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penyusunan kebijakan yang lebih

---

<sup>25</sup> Subandono Diposaptono, *Sebuah Kumpulan Pemikiran: Mitigasi Bencana Dan Adaptasi Perubahan Iklim, Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia* (Direktorat Pesisir dan Lautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2011), [https://www.unisdr.org/files/1037\\_hyogoframeworkforactionenglish.pdf](https://www.unisdr.org/files/1037_hyogoframeworkforactionenglish.pdf).

<sup>26</sup> Hanafi, *Modul Risiko, Proses Manajemen Risiko, Dan Enterprise Risk Management*.

<sup>27</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah” (n.d.).

komprehensif dan terstruktur dalam meminimalisir risiko yang mungkin timbul selama pelaksanaan ibadah haji.

### C. Mitigasi dalam Perspektif Islam

Dalam Islam memberikan panduan kepada umatnya tentang ibadah (ubudiyah) dan kehidupan duniawi (amaliyah), termasuk dalam menangani bencana, Agama Islam adalah agama yang lengkap, rumit, dan ideal. Menurut Syadzili dalam bukunya yang berjudul “Penanggulangan bencana berbasis masyarakat dalam perspektif Islam”<sup>28</sup>, Menurut tujuan mereka, bencana dapat dibagi menjadi tiga kategori. Yang pertama berfungsi sebagai ujian (ibtila') untuk menguji kesabaran dan iman manusia sebagai makhluk Allah (Al-Baqarah: 155); yang kedua adalah peringatan (tadzkirah) agar manusia tetap patuh dan tunduk kepada Allah (Yunus: 44); dan yang ketiga adalah hukuman (uqubah) akibat perbuatan manusia, agar mereka menyadari kesalahan mereka, bertaubat, dan meminta ampun kepada Allah (Al-Baqarah: 59). Mereka dapat digunakan untuk merenungkan kembali dan menilai berbagai tes yang Anda hadapi.

Selain itu, agama Islam memahami ide-ide yang berasal dari Al-Quran untuk mengurangi peluang bencana. Konsep ini sesuai dengan prinsip Islam, yang menggambarkan rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil alamin) dan agama yang berlaku di segala waktu dan tempat (sholihun likulli zaman wa al makan). Berikut adalah beberapa dalil naqli yang berkaitan dengan mitigasi yang diambil dari Qur'an:

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلَةٍ  
إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ

---

<sup>28</sup> Nahdlatul Ulama (NU). Community Based Disaster Risk Management (CBDRM). Project Manajemen Unit A. Fawa'id Syadzili, M. Ali Yusuf, Abdul Jamil Wahab, *Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat Dalam Perspektif Islam*, cet. 1 (Jakarta : Project Management Unit Community Based Disaster Risk Management NU., 2007, n.d.).

“47. (Yusuf) berkata, Bercocoktanamlah kamu tujuh tahun berturut-turut! Kemudian apa yang kamu tuai, biarkanlah di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. 48. Kemudian, sesudah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit (paceklik) yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari apa (bibit gandum yang kamu simpan. (Yusuf/12:47-48)”

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa (seseorang), kecuali dengan izin Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (At-Taghabun/64:11)” ayat dalam surat Yusuf/12:47-48<sup>29</sup>

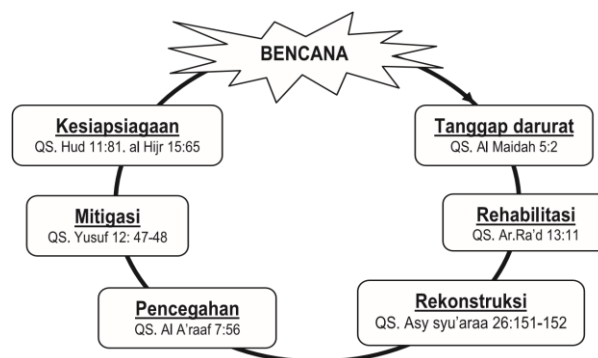
Jadi, orang tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, sehingga diperlukan kesiapsiagaan untuk memastikan masa depan yang lebih baik. Sementara itu, surat At-Taghabun/64:11<sup>30</sup> meyakinkan orang-orang yang beriman bahwa musibah ini terjadi dengan izin Allah dan mereka akan menerimanya dengan tenang.

Dari ayat-ayat tersebut, ada pelajaran penting yang dapat diambil. Sebagai umat Muslim yang beriman, Kita harus berusaha dan mempersiapkan diri untuk masa depan yang tidak pasti. Perencanaan, pencegahan, dan penanggulangan diperlukan untuk mengurangi dampak dari kejadian yang tidak diharapkan.

---

<sup>29</sup> “Surah Yusuf 12 : 47,” accessed September 14, 2024, <https://www.quran-wiki.com/ayat.php?sura=12&aya=47>.

<sup>30</sup> “Surah At-Taghabun 64 : 11,” accessed September 14, 2024, <https://www.quran-wiki.com/ayat-64-11-atTaghabun>.



Gambar 2.1 Siklus penanggulangan bencana dalam perspektif Islam (Syadzili,2007:79)

### 1. Langkah Mitigasi Penyelenggaraan Haji

Mitigasi adalah salah satu metode penanganan bencana yang paling hemat biaya dibandingkan dengan tindakan seperti evakuasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi, sehingga harus dilakukan secara bersamaan melalui program pemerintah. Karena studi kebijakan publik berkaitan dengan tindakan pemerintah yang harus atau tidak harus dilakukan, studi ini harus mencakup mitigasi secara keseluruhan.<sup>31</sup> Dalam hal ini, kebijakan publik juga harus digunakan untuk mengurangi penyelenggaraan haji.

Menurut Mustopa didjaja (2002)<sup>32</sup>, Keseluruhan pola kelembagaan dalam pembuatan kebijakan dikenal sebagai sistem kebijakan publik, yang terdiri dari empat elemen utama: Input meliputi keadaan atau unsur-unsur yang menyebabkan timbulnya masalah kebijakan publik seperti tuntutan, tantangan, dan peluang yang harus segera diatasi melalui kebijakan; proses, yang melibatkan berbagai lembaga dan kelompok yang terlibat dalam pembuatan kebijakan; dan output, yang merupakan kebijakan publik yang dibuat untuk mencapai tujuan kebijakan.

<sup>31</sup> Burhanudin Mukhamad Faturahman, "KONSEPTUALISASI MITIGASI BENCANA MELALUI PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK" 3 (2019): 5–10.

<sup>32</sup> A.R Mustopadidjaja, "Beberapa Dimensi Dan Dinamika Kepemimpinan Abad 21," 2002.

Karena Kementerian Agama adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan haji di Indonesia, kebijakan publik harus dibuat untuk mengatasi masalah ini.

Ripley dalam Yulianto Kadji,<sup>33</sup> menguraikan tiga langkah dalam penyusunan agenda kebijakan publik: Pertama, memastikan para pembuat kebijakan memahami bahwa suatu fenomena benar-benar merupakan masalah yang memerlukan perhatian. Hal ini penting karena gejala tertentu bisa dipandang sebagai masalah oleh sebagian masyarakat atau elit politik, namun dianggap bukan masalah oleh kelompok lainnya; Kedua, menentukan batasan masalah yang jelas; dan Ketiga, untuk memasukkan masalah tersebut ke dalam kebijakan pemerintah, masyarakat, elit politik, dan pihak-pihak terkait harus mendukung.

Perumusan dan validasi kebijakan dilakukan setelah masalah masuk ke dalam agenda kebijakan pemerintah. Selanjutnya, analisis kebijakan harus mengumpulkan dan menganalisis informasi yang relevan, membuat pilihan kebijakan yang berbeda, melakukan studi dan bernegosiasi, dan pada akhirnya memilih kebijakan yang paling sesuai.

Langkah berikutnya adalah pelaksanaan kebijakan, yang membutuhkan dukungan sumber daya dan penyusunan organisasi pelaksana kebijakan; pelaksanaan menghasilkan kinerja dan dampak. Langkah terakhir adalah evaluasi implementasi, kinerja, dan dampak kebijakan, yang membantu perbaikan kebijakan di masa depan.

---

<sup>33</sup> Yulianto Kadji, *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan Dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas*. (UNG Press Gorontalo, 2015).

### BAB III

## MUDZAKARAH PERHAJIAN, GAMBARAN UMUM HASIL REKOMENDASI MUDZAKARAH PERHAJIAN 2023 DAN PROBLEMATIKA PERHAJIAN 2023

### A. MUDZAKARAH PERHAJIAN

Secara teratur, berbagai pihak di Indonesia, khususnya Kementerian Agama Republik Indonesia, mengadakan Mudzakarah Perhajian, sebuah tempat untuk berbicara tentang penyelenggaraan ibadah haji. Forum ini mengundang berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, ulama, akademisi, lembaga kesehatan, dan penyelenggara haji, untuk berdiskusi dan mencari solusi terkait permasalahan, tantangan, dan penyempurnaan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Hasilnya kemudian digunakan sebagai rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki kualitas pelanan penyelenggaraan haji. Mudzakarah perhajian berbeda dengan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI, yang meruakan forum pengkajian untuk mengeluarkan fatwa hukum.<sup>34</sup>

Tujuan utama dari Mudzakarah Perhajian adalah untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, baik dari sisi administrasi, kesehatan, logistik, hingga pelayanan kepada jemaah haji. Rekomendasi-rekomendasi tersebut sangat penting dalam menjawab tantangan kontemporer yang dihadapi oleh jemaah haji Indonesia, seperti kesehatan jemaah, pembagian kuota, teknologi, dan perbaikan sistem transportasi dan akomodasi.

Topik yang seringkali dibahas dalam mudzakarah perhajian antara lain : pembagian kuota haji yang adil dan efisien. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi jemaah, terutama lansia. Penggunaan teknologi untuk mempermudah administrasi dan logistik haji. Perbaikan sistem akomodasi dan transportasi. Dan masalah keuangan dan transparansi dalam pengelolaan dana haji.

---

<sup>34</sup> Fahham & Dwiarti, "Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI, Mudzakarah Perhajian," 2023.

Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) mendirikan forum diskusi yang dikenal sebagai Muzakarah. Salah satu tugas Mudzakarah Perhajian adalah untuk membicarakan berbagai masalah penting yang akan membentuk dasar kebijakan untuk penyelenggaraan ibadah haji. Tema tahun 2023 adalah istithaah kesehatan Jemaah Haji dan manajemen dan distribusi daging al-Hadyu (Dam). Untuk tahun berikutnya, acara ini akan menghasilkan rekomendasi untuk penyelenggaraan haji. Acara ini, yang akan diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dari tanggal 23 hingga 25 Oktober 2023, Menteri Agama Republik Indonesia Yaqut Cholil Qoumas akan membuka secara langsung. Akademisi, tokoh ormas Islam, dan alim ulama juga hadir di forum ini.

## **B. Gambaran Umum Rekomendasi Mudzakarah Perhajian 2023**

Dengan tema "Penguatan istitha'ah Kesehatan Haji", rekomendasi Mudzakarah Perhajian 2023 bertujuan untuk meningkatkan pembinaan, layanan, dan perlindungan Jemaah Haji. Fokus utamanya adalah memastikan jemaah haji dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar, aman, dan nyaman. Beberapa langkah penting yang disarankan adalah menetapkan istitha'ah kesehatan sebagai syarat pelunasan biaya perjalanan dan keberangkatan haji, serta meminta BPJS Kesehatan untuk mengurangi biaya pemeriksaan kesehatan.

KH. Afifuddin Haritsh bersama Slamet dari Kementerian Agama, KH. Miftah Faqih dari PBNU, Syakir Jamaluddin dari organisasi Muhammadiyah, Muhammad Imran dari Kementerian Kesehatan, dan Sunidja dari Asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah/Haji membacakan hasil rekomendasi Mudzakarah Perhajian 2023.<sup>35</sup>

Menurut Mudzakarah, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan BPJS Kesehatan harus bekerja sama untuk membuat undang-undang yang mengatur pemeriksaan istitha'ah kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan

---

<sup>35</sup> Abdullah Abash, "Rekomendasi Mudzakarah Perhajian Tahun 2023," 2023.

Nomor 15 Tahun 2016 menetapkan bahwa pemeriksaan tersebut mencakup kesehatan fisik, mental, dan kognitif serta aktivitas sehari-hari. Hal ini mencerminkan upaya menyeluruh untuk memastikan bahwa Jemaah yang berangkat ke Tanah Suci benar-benar siap secara kesehatan, oleh sebab itu kedepannya, Kementerian Agama akan melakukan pemeriksaan kesehatan jamaah haji lebih awal sebelum melakukan pelunasan biaya umrah/haji..

Selain itu, pengembangan aplikasi Siskohatkes diusulkan untuk menyempurnakan penetapan istitha'ah kesehatan, yang menjadi bagian dari langkah digitalisasi dalam penyelenggaraan haji. Selain itu, sosialisasi dan pendidikan ditekankan. Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan diminta untuk secara berjenjang memberikan pendidikan tentang istitha'ah kesehatan melalui bimbingan dan penyuluhan manasik haji, dan melibatkan masyarakat dalam prosesnya.

Kesehatan adalah hasil utama dari mudzakah perhajian yang tak dapat ditawar, yang dilakukan untuk memastikan bahwa para jamaah dapat menjalankan ibadah haji dengan nyaman, aman, dan lancar sambil menghindari risiko yang tinggi. Mudzakah menyarankan agar buku panduan bimbingan manasik haji memasukkan materi tentang fiqih haji untuk jamaah yang lebih tua dan istitha'ah kesehatan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa Jemaah yang lebih tua mendapatkan informasi yang tepat dan sesuai dengan kondisi kesehatan mereka, mengingat tantangan fisik yang dihadapi selama ibadah haji.<sup>36</sup>

Timbulnya kebijakan juga ini didukung penuh oleh Wakil Sekertaris lakpesdam NU DKI Jakarta yakni Muhammad Ghurfron. Ghurfron menyatakan dilakukannya penambahakan pemeriksaan kesehatan jiwa atau psikologis kepada jemaah agar mampu mengurangi beberapa kasus kesehatan yang sering terjadi pada jemaah ditanah suci, khususnya pada lansia seperti demensia dan gangguan kecemasan.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Abdullah Abash....ibid

<sup>37</sup> Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, "Perketat Istitha'ah Kesehatan, Jemaah Haji Akan Jalani Pemeriksaan Fisik Dan Psikologis," 2023.

### C. **Problematika Kesehatan Penyelenggaraan Haji 2023**

Beberapa masalah muncul selama pelaksanaan ibadah haji; masalah-masalah ini dapat muncul sebelum atau selama pelaksanaan ibadah haji di tanah air atau di Arab Saudi. Tidak memungkiri masalah pun dapat terjadi saat proses pemeriksaan berkas ataupun kesehatan fisik. Salah satu hal utama yang menjadi masalah yang sangat umum terjadi pada jemaah haji yakni masalah kesehatan. Melalui situs resmi Kementerian Agama, Kementerian agama melakukan perketatan istihah kesehatan jemaah haji meliputi pemeriksaan fisik juga psikologis.

Meskipun pandemi COVID 19 telah mereda, masalah kesehatan lainnya tetap ada, terutama dengan banyaknya jemaah yang berasal dari kelompok lansia atau memiliki kondisi kesehatan khusus. Adapun beberapa masalah kesehatan lainnya antara lain:

1. Jumlah lansia yang tinggi, yang rentan memiliki masalah kesehatan risiko tinggi
2. Adanya penyakit menular dan wabah, akibat perbedaan cuaca yang panas
3. Kurangnya ketersediaan tenaga medis yang memadai
4. Akses terhadap obat-obatan dan peralatan kesehatan yang terbatas

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan melalui web resmi “sehatnegeriku”, Kemenkes menggelar MCU bagi jemaah dengan risiko kesehatan tinggi. Diketahui jemaah haji yang tiba di Arab Saudi pada Juni 2023 berjumlah 81.198 orang yang tergabung dalam 211 kluster jemaah haji dengan jumlah jemaah risiko tinggi sebanyak 72,13%. Oleh karena tingginya angka jemaah yang memiliki risiko kesehatan tinggi berakibat pada meningkatnya tenaga penyelenggara kesehatan haji tahun 2023 dalam memastikan kesehatan haji pada jemaah haji agar tetap berjalan lancar selama proses penyelenggaraan haji. Oleh sebab itu, Kementerian Kesehatan tahun 2023 melakukan inovasi untuk memperkuat pemeriksaan kesehatan salah satunya yakni MCU (*medical check up*) untuk jemaah haji risiko tinggi. Perketatan

pemeriksaan kesehatan oleh Kementerian Gama didasarkan pada hasil observasi kesehatan jemaah haji pada tahun 2023 ditemukan permasalahan kesehatan, antara lain:

1. Sebanyak 43,78% jemaah haji berusia lebih dari 60 tahun.
2. Jemaah haji Indonesia yang meninggal pada tahun 2023 mencapai 774 jiwa, dengan mayoritas berumur lansia.
3. Penyakit penyebab kematian terbanyak pada jemaah haji lansia adalah sepsis, syok kardiogenik dan penyakit jantung koroner.

Menurut Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Arab Saudi, sebanyak 62 jemaah haji Indonesia meninggal di Arab Saudi.<sup>38</sup> Tiga penyakit yang paling sering menyebabkan kematian jemaah haji pada tahun 2023 adalah infark miokard akut, syok kardiogenik, stroke, pneumonia, penyakit paru obstruktif kronis, kelelahan, dan dehidrasi, menurut data dari penyelenggara kesehatan haji Arab Saudi.<sup>39</sup>

1. Infark Miokard Akut dengan kasus kematian sebanyak 19 jiwa.
2. Syok Kardiogenik dengan kasus kematian sebanyak 14 jiwa, dan
3. Stroke (Komorbid) dengan kasus kematian sebanyak 4 jiwa.

Klinik Kesehatan Haji Indonesia terutama menangani pasien dengan pneumonia atau peradangan akut paru-paru akibat infeksi (104 kasus), diabetes (78 kasus), dan penyakit paru obstruktif kronis (773 kasus). Mereka juga merawat pasien dengan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) sebanyak 22.858 kasus, hipertensi sebanyak 17.881 kasus, dan kelelahan atau kelelahan sebanyak 7.731 kasus. Disebabkan oleh iklim panas Arab Saudi, rendahnya kelembapan, dan populasi jemaah haji yang padat, daya tahan tubuh menurun, menyebabkan kelelahan dan penyakit lainnya.

Hasil observasi tersebut di dukung oleh WHO yang menyatakan sekitar 40% jemaah haji Indonesia adalah lansia, rentan mengalami kondisi kesehatan terkait penuaan. Terdapat juga jemaah haji penyandang disabilitas yang membutuhkan pendampingan selama menjalankan ibadah haji. Sehingga

---

<sup>38</sup> Aqiel Munawar, 'Sistem Informasi Dan Komputerisasi Haji Terpadu', 2024.

<sup>39</sup> Anwar, "Penyakit Penyebab Tertinggi Jemaah Haji Wafat," June 2023.

WHO melakukan kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan untuk mendukung Kementerian Agama pada bulan April hingga Mei 2023 mengadakan sosialisasi untuk 600 orang jemaah haji di beberapa kabupaten/kota mengenai pentingnya pemeriksaan kesehatan, pembinaan, vaksinasi dan orientasi tentang protokol kesehatan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. HASIL PENELITIAN REKOMENDASI MUDZAKARAH PERHAJIAN 2023**

Setiap tahun, ratusan bahkan jutaan orang melakukan perjalanan ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Jumlah jemaah haji tahun 2023 meningkat signifikan ketimbang jumlah jemaah yang sangat terbatas pada tahun-tahun sebelumnya akibat pandemi. Di perkirakan pada tahun 2023, sekitar dua juta orang diperkirakan berkumpul di mekkah untuk menunaikan ibadah haji, sekitar 200.000 orang diantaranya dikonfirmasi berasal dari indonesia. Dengan banyaknya orang yang melakukan aktivitas fisik intens di dalam ruangan tertutup, ibadah haji menimbulkan berbagai risiko kesehatan seperti kelelahan, dehidrasi serta masih menjadi kekhawatiran mengenai penularan virus covid-19.<sup>40</sup>

Informasi penting lainnya yakni sekitar 40% jemaah haji yang berangkat dari indonesia merupakan seorang lansia, yang tentunya rentan mengalami kondisi kesehatan terkait dengan penuaan. Terdapat pula jemaah penyandang disabilitas yang membutuhkan pendamping selama menjalankan ibadah haji. Menyadari banyaknya jumlah jemaah, tentunya pemerintah memperketat sosialisasi terkait kesehatan para jemaah haji. Sosialisasi ini dapat sekaligus dijadikan wadah untuk melakukan observasi dan penelitian pada jemaah haji.

Kepala bidang layanan kesehatan lansia dan disabilitas PPIH (Panitia Penyelenggara Ibadah Haji) Arab Saudi Tahun 2023 yakni bapak Slamet mengemukakan bahwa kebijakan mengenai istihā'ah kesehatan akan diperketat dan akan dilakukan secara komprehensif untuk menekan risiko pada jemaah haji. Adanya tujuan dan pertimbangan ini lah yang menjadi dasar lahirnya rekomendasi mudzakaroh perhajian 2023.

---

<sup>40</sup> Rohani Budi Prihatin, "Permasalahan Penyelenggaraan Haji 2023," *Jurnal Bidang Kesehatan Rakyat* 15, no. 13 (2023).

Pada tahun 2023, Muzakarah Perhajian Indonesia mengeluarkan sembilan saran untuk meningkatkan pembinaan, layanan, dan perlindungan para jemaah haji. Tentu saja, rekomendasi ini sangat penting bagi jemaah haji untuk menjamin kesehatan mereka agar aman, nyaman, dan mengurangi risiko.

Rekomendasi ini harus dibaca oleh perwakilan dari berbagai organisasi islam, asosiasi KBIHU, dan Unit Pelaksanaan Teknis Asrama Haji dari berbagai wilayah di Yogyakarta pada 24 Oktober 2023.



Sumber : Web Resmi Kementerian Agama

Gambar 4.1 Pembacaan 9 Rekomendasi Mudzakarah 2023

Berikut 9 rekomendasi di penutupan mudzakarah perhajian tahun 2023 dengan mengusung tema “Penguatan istihah kesehatan jemaah haji”.<sup>41</sup>

**Pertama**, Sebagai salah satu syarat wajib pelaksanaan haji, jemaah haji yang ingin melakukan pemberangkatan ke tanah suci harus memenuhi kriteria intiha'ah kesehatan sebelum melakukan pelunasan.

**Kedua**, Sebelum pembayaran biaya perjalanan haji dan keberangkatan, jemaah harus melakukan istihah kesehatan.

**Ketiga**, Kemenag melakukan perumusan pedoman pelunasan biaya perjalanan ibadah haji yang mencakup peraturan mengenai syarat istihah'ah kesehatan dalam pelunasan biaya perjalanan ibadah haji.

---

<sup>41</sup> Abdullah Abash, “Rekomendasi Mudzakarah Perhajian Tahun 2023.”....ibid

**Keempat**, Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016, Kementerian Kesehatan melakukan istihah kesehatan jemaah haji atau perubahannya, serta pemeriksaan lain yang mencakup aktivitas sehari-hari, kesehatan jiwa, dan kognitif.

**Kelima**, Kementerian Kesehatan menyempurnakan aplikasi Siskohatkes untuk menetapkan istihah kesehatan jemaah haji.

**Keenam**, Kementerian Agama dan Kesehatan secara bertingkat menyebarkan dan mendidik para jemaah haji tentang istihah kesehatan haji melalui penyuluhan kesehatan dan bimbingan manasik haji, serta melibatkan masyarakat, kbihu, dan organisasi masyarakat Islam.

**Ketujuh**, Kementerian Agama Kabupaten/Kota bekerja sama dengan Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, dan lainnya untuk memberikan instruksi dan pemahaman kepada jemaah haji yang tidak memenuhi istihah kesehatan.

**Kedelapan**, Buku panduan bimbingan manasik haji Kementerian Agama harus mencakup materi istihah kesehatan dan fiqih haji bagi orang tua.

**Kesembilan**, Disarankan agar Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan BPJS Kesehatan segera mengatur pembiayaan pemeriksaan kesehatan jemaah haji. Ini akan memungkinkan BPJS Kesehatan mengurangi biaya pemeriksaan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa hasil rekomendasi mudzakah perhajian 2023 menghasilkan sembilan point yang fokus pada istihah kesehatan untuk mendidik, membantu, dan melindungi jemaah haji agar mereka dapat menjalankan ibadah haji dengan aman dan lancar.

## **B. ANALISIS ISTITHA'AH KESEHATAN DALAM REKOMENDASI MUDZAKARAH PERHAJIAN 2023**

Sebagaimana diketahui, ibadah haji menjadi kewajiban bagi mereka yang memiliki kemampuan (istihah), dan tidak boleh ditunda. Sebagai bagian dari melaksanakan haji, ada kewajiban untuk melakukan istighah kesehatan. Para

imam mazhab menyatakan bahwa istiha'ah adalah syarat untuk melakukan ibadah haji:<sup>42</sup>

1. Imam Maliki menyatakan bahwa istiha'ah sudah termasuk bagi mereka yang dapat berjalan kaki dan mencari nafakh atau bekerja selama ibadah haji dan memiliki biaya yang cukup untuk keluarga yang ditinggalkan.
2. Istiha'ah terdiri dari dua bagian, menurut Imam Syafi'i: kemampuan dengan bantuan orang lain dan kemampuan sendiri.
3. Imam Hanafi menyatakan bahwa ada tiga jenis makna istiha'ah, yaitu <sup>43</sup>: Menurut mazhab Hanafi, seseorang yang termasuk dalam salah satu dari tiga jenis istiha'ah: istiha'ah maliyah (kemampuan untuk biaya), istiha'ah badaniyah (kemampuan untuk kesehatan), dan istiha'ah amniyyah (kemampuan untuk melindungi diri selama perjalanan dan sampai ke tanah air). Seseorang yang termasuk dalam salah satu kategori ini wajib melaksanakan haji. Selama berada di tanah suci, seseorang harus memiliki kemampuan untuk membiayai dirinya sendiri dan keluarganya yang ditinggalkan di tanah air. Kemampuan fisik adalah komponen kedua. Untuk melakukan ibadah haji, seseorang harus sehat secara fisik dan rohani. Mereka tidak diharuskan menderita penyakit apa pun yang dapat membahayakan mereka, bahkan penyakit menular yang dapat membahayakan orang lain. Haji tidak boleh dilakukan oleh orang yang buta, lumpuh, cacat, atau lanjut usia yang tidak dapat berjalan sendiri. Kemampuan ketiga adalah untuk menjaga keselamatan dan keamanan selama perjalanan, seperti memiliki seorang maheam untuk wanita mahram yang baligh, berakal, dan tidak fasik untuk menemani mereka selama perjalanan haji dan menjaga keluarga yang ditinggalkan di tanah air.
4. Imam Hambali membagi istiha'ah menjadi dua komponen: kemampuan menyiapkan bekal dan mengendarai mobil.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Ahmad Kartono, *Solusi Hukum Manasik Dalam Permasalahan Ibadah Haji Menurut Empat Mazhab* (Tangerang: Pustaka cendekiamuda, 2016).

<sup>43</sup> Hasan Muarif Ambariy, *Ensiklopedia Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2020).

<sup>44</sup> Hasan Muarif Ambariy.....ibid

5. Menurut ulama mutaakhirin (kontemporer), kesehatan, kesempatan, dan keamanan harus dimasukkan dalam istiha'ah sebagai komponen yang memungkinkan seseorang sampai ke tempat haji. Ini juga relevan dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi dan Indonesia.
6. Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang ketentuan istiha'ah, orang Islam dianggap mampu melaksanakan ibadah haji jika mereka memiliki kemampuan jasmaniah, ruhaniah, dan spiritual yang memungkinkan mereka melakukannya tanpa melupakan kewajiban terhadap keluarga mereka.<sup>45</sup>

Permasalahan istiha'ah atau kemampuan seseorang untuk melakukan ibadah haji sering kali menjadi bahan diskursus yang sangat fundamen, sehingga penting dibahas saat kegiatan mudzakah untuk mendiskusikan lebih mendalam tentang istiha'ah kesehatan. Guru besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yakni Hilman Latief menyatakan dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2023 angka kematian jemaah relatif tinggi, bahkan paling tinggi dalam 10 tahun terakhir penyelenggaraan haji.<sup>46</sup>

Permenkes Nomor 15 tahun 2016 tentang "istihah'ah kesehatan jemaah haji" dibuat untuk menjamin keselamatan jemaah saat berada di tanah suci karena ibadah haji adalah ibadah fisik. Dalam hal pertauran pemerintah tentang istihah'ah kesehatan jemaah haji, ini mengacu pada kemampuan jemaah haji untuk melakukan ibadahnya sesuai dengan hukum Islam melalui penilaian kesehatan fisik dan mental yang akurat.

Selain itu, Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji menyatakan "Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan ibadah haji, akomodasi, transportasi, pelayanan kesehatan, keamanan, dan hal-hal lain yang diperlukan oleh jemaah haji":

---

<sup>45</sup> Iskandar, "Istihah'ah Kesehatan Haji," Kementerian Kesehatan, 2023.

<sup>46</sup> Mustarini Bella Vitiara, "Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah: Permasalahan Haji Terus Berkembang, Mudzakah Perhajian Penting Digelar Setiap Tahun," Direktorat Jenderal penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2023.

1. Pemandu manasik haji dan materi lainnya baik di tanah air maupun selama perjalanan di Arab Saudi,
2. Pelayanan yang memadai dalam hal akomodasi, konsumsi, transportasi, dan layanan kesehatan baik di tanah air maupun di Arab Saudi,
3. Perlindungan sebagai Warga Negara Indonesia,
4. Penggunaan paspor haji dan dokumen tambahan yang diperlukan untuk melaksanakan ibadah haji, dan
5. Memberikan kemudahan transportasi dan akomodasi selama berada di tanah air, di Arab Saudi, dan setelah kembali ke tanah air.<sup>47</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas tentang pentingnya istihah, khususnya istihah kesehatan bagi para jemaah haji, penyelenggaraan haji tidak boleh melanjutkan proses ibadah haji jika jemaah haji tersebut tidak memenuhi syarat. Hal ini dilakukan untuk mendidik, melayani, dan melindungi jemaah haji agar mereka dapat melaksanakan ibadah haji mereka dengan lancar, aman, dan aman.

### **C. Pembahasan Mudzakarah Perhajian 2023**

#### **1. Mitigasi Penyelenggaraan Haji Hasil Rekomendasi Mudzakarah Perhajian 2023**

Ibadah haji tahun 2023 diwarnai dengan sejumlah persolan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Salah satunya yakni mengenai kesehatan para jemaah haji tahun 2023 yang didominasi oleh lansia. Kemenag menerapkan prinsip istihah kesehatan untuk menangani jemaah lansia, dimana prinsip ini penting untuk diterapkan karena masih ada anggapan bahwa wafat di tanah suci merupakan hal yang mulia.

Mitigasi penyelenggaraan haji 2023 yang dilakukan oleh kementerian Agama RI antara lain dengan menyiapkan 4.421 petugas jemaah haji serta melakukan pematangan layanan haji ramah lansia. Dalam upaya meningkatkan pelayanan haji, program "haji Ramah Lansia" dirancang

---

<sup>47</sup> Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, "Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji," Kementerian Hukum, 2008.

untuk memprioritaskan jemaah yang lebih tua dan dengan masalah kesehatan yang signifikan. Kuota haji Indonesia untuk tahun 2023 berjumlah 221.000 orang, dengan 203.320 kuota reguler dan 17.680 kuota khusus.

Program “Haji Ramah Lansia” tahun 2023 merupakan salah satu inisiatif dari pemerintah Indonesia untuk memberikan kemudahan, kenyamanan dan keselamatan bagi jemaah haji yang berusia lanjut. Program ini bertujuan agar lansia dapat melaksanakan ibadah haji dengan lebih mudah dan aman, mengingat bahwa ibadah haji melibatkan banyak kegiatan fisik yang cukup berat, seperti berkeliling ka’bah (tawaf), berjalan jauh, serta menjalani serangkaian kegiatan lainnya.

Sumber : Web Resmi Kementerian Agama



Gambar 4.2 Program Haji Ramah Lansia 2023

Berikut merupakan program kegiatan dari “Haji Ramah Lansia 2023” diantaranya:<sup>48</sup>

a. Penyusunan kriteria dan kuota lansia

Kementerian Agama memastikan bahwa orang tua yang pergi haji dalam kondisi kesehatan yang baik dan dapat melakukan ibadah dengan baik. Mereka yang memenuhi kriteria kesehatan yang diperlukan (istihah kesehatan) juga lebih diprioritaskan untuk didaftarkan sebagai warga emas. Jemaah haji yang berusia 65 tahun

---

<sup>48</sup> Nur lala khosyatillah, “Penyelenggaraan Ibadah Haji Ramah Lansia Tahun 2023 Di Kementerian Agama Kota Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah” (IAIN syekh nurjati Cirebon, 2024).

ke atas (dikenal sebagai lansia) mendapat perhatian khusus. Kuota untuk orang tua dibatasi dalam jumlah tertentu untuk memastikan mereka mendapatkan layanan terbaik selama perjalanan haji.

b. Fasilitas khusus lansia

Baik dalam pesawat terbang maupun selama perjalanan ke tanah suci, orang lanjut usia diprioritaskan dalam transportasi. Misalnya, ada bus yang lebih nyaman dan dilengkapi dengan fasilitas khusus untuk orang tua. Di sisi lain, penginapan dan tempat menginap dirancang khusus untuk orang tua, termasuk tempat tidur yang lebih mudah diakses dan fasilitas lainnya yang ramah lansia. Tenaga medis yang berpengalaman melayani setiap kelompok lansia. Tim media khusus disiapkan untuk memberikan penanganan kesehatan cepat dan tepat bagi orang tua, baik di tempat suci maupun di Indonesia.

c. Pendampingan lansia

Selama rangkaian ibadah haji, lansia akan didampingi oleh petugas khusus, juga dikenal sebagai "muthawif", yang bertugas memberikan panduan, bantuan fisik, dan membantu lansia menjalani ibadah dengan lebih mudah. Lanjut usia biasanya berkumpul dalam kelompok yang lebih kecil, yang memungkinkan mereka mendapatkan perhatian lebih dari anggota keluarga atau petugas yang mendampinginya.

d. Pendekatan prioritas dalam ibadah

Lansia diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji dengan prioritas, terutama dalam kegiatan yang memerlukan waktu lama atau jarak jauh, seperti tawaf atau sa'i. Jika diperlukan, ada pengaturan khusus yang memungkinkan mereka menyelesaikan ibadah dengan lebih cepat atau dengan bantuan alat seperti kursi roda.

e. Sosialisasi dan pelatihan untuk lansia

Lansia diajarkan cara menjaga kesehatan, makan makanan yang sehat, dan menghindari kelelahan selama ibadah haji. Kementerian agama menawarkan program sosialisasi atau pelatihan sebelum

keberangkatan. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi tentang aktivitas haji serta cara orang tua dapat mempersiapkan diri secara fisik dan mental untuk haji.

f. Perhatian khusus pada kesehatan

Kesehatan orang tua menjadi prioritas utama. Pemeriksaan kesehatan lebih intensif dilakukan untuk memastikan orang tua dalam kondisi fisik yang cukup untuk melakukan ibadah haji dan pelatihan kesehatan, termasuk cara menjaga stamina dan mencegah penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan masalah jantung.

g. Penyuluhan tentang prosedur haji

Untuk membantu orang tua menjadi lebih tenang dan merasa aman saat menjalani rangkaian ibadah haji, sosialisasi tentang aturan, prosedur, dan persiapan mental dilakukan secara khusus untuk mereka.

h. Penggunaan teknologi

Pemberian informasi menggunakan teknologi juga menjadi bagian dari program haji ramah lansia, dengan memanfaatkan aplikasi atau sistem berbasis digital untuk memberikan panduan dan menghubungkan lansia dengan petugas di tanah suci. Ini juga mempermudah komunikasi antara keluarga di Indonesia dan jemaah lansia yang sedang melaksanakan ibadah haji.

Dengan adanya program Haji Ramah Lansia pada tahun 2023, diharapkan jemaah haji yang berusia lanjut dapat melakukan ibadah haji dengan lebih aman, nyaman, dan lancar. Ini akan membantu mereka menjalani ibadah mereka dengan khusyuk dan sesuai dengan ketentuan syariat.

Untuk menjamin keberhasilan dan keselamatan para jemaah selama ibadah haji, salah satu fokus utama adalah mengatasi masalah lain yang terkait dengan penyelenggaraan haji 2023, khususnya yang berkaitan dengan istihah kesehatan. Pemerintah Indonesia, melalui kementeriannya yang bertanggung jawab atas agama, dan lembaga terkait

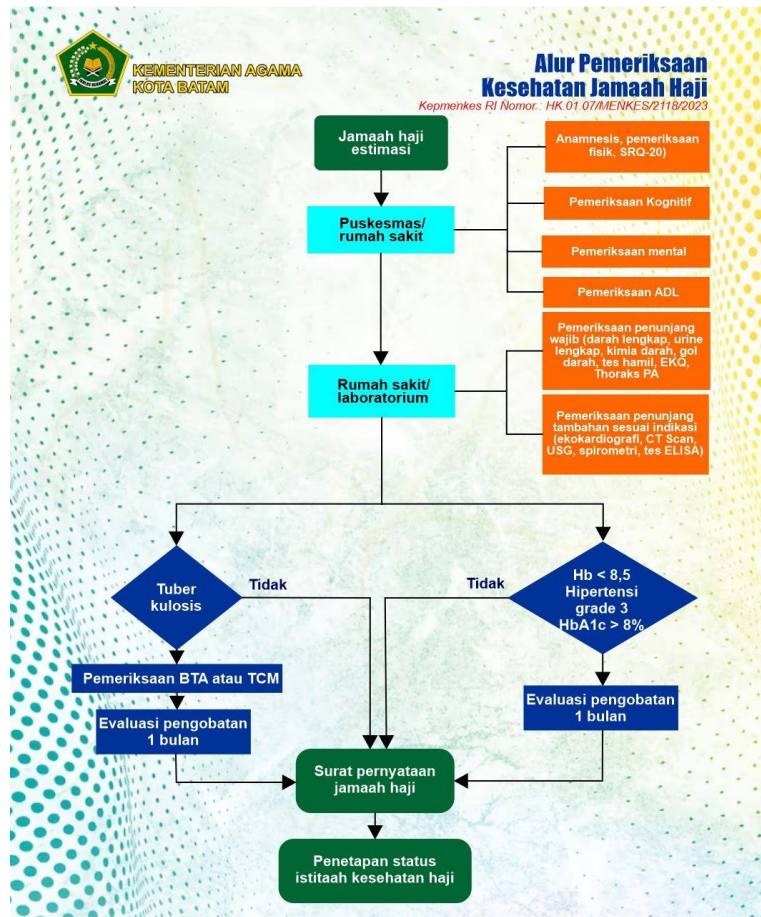
seperti kementerian kesehatan, telah mengambil beberapa langkah mitigasi. Dalam hal istihah kesehatan selama penyelenggaraan haji 2023, ini adalah beberapa langkah mitigasi yang diterapkan:

a. Pemeriksaan kesehatan pra-keberangkatan

Setiap calon jemaah haji diwajibkan untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan yang meliputi beberapa aspek seperti:

- 1) Pemeriksaan kondisi fisik secara menyeluruh (misalnya tekanan darah, kondisi jantung, paru-paru, dan riwayat penyakit).
- 2) Penyuluhan tentang pentingnya vaksinasi, seperti vaksin meningitis, flu, dan vaksinasi lainnya yang diperlukan oleh otoritas kesehatan Saudi Arabia.
- 3) Penyaringan terhadap penyakit menular, terutama yang dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan ibadah haji, seperti penyakit saluran pernapasan atau kondisi kronis.

Berikut merupakan alur pemeriksaan kesehatan jemaah haji 2023 yang di ungha pada web resmi Kementerian Agama:



Sumber : Web Resmi Kementerian Agama

Gambar 4.3 Alur Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji 2023

Di fasilitas kesehatan tempat jemaah haji menginap, tim penyelenggara kesehatan haji kabupaten/kota memasukkan data kesehatan mereka ke dalam sistem komputerisasi haji terpadu bidang kesehatan (Siskohatkes). Untuk jemaah haji, pemeriksaan medis termasuk:

- 1) Pemeriksaan medis (medical check up)
- 2) Pemeriksaan kognitif
- 3) Pemeriksaan kesehatan mental, dan

- 4) Pemeriksaan kemampuan melakukan aktivitas kesehatan (activity daily living) secara mandiri.<sup>49</sup>
- b. Sertifikasi kesehatan

Setiap calon jemaah harus mendapatkan sertifikat kesehatan atau "istiha'ah" dari fasilitas kesehatan atau dokter sebelum diberangkatkan. Ini menunjukkan bahwa mereka memenuhi standar kesehatan mereka dan siap untuk menjalani ibadah haji tanpa membahayakan diri mereka sendiri atau orang lain.
  - c. Pembinaan kesehatan dan penguatan fisik

Para jemaah diberi instruksi tentang pentingnya mempertahankan stamina, terutama untuk perjalanan jauh dan aktivitas fisik yang signifikan selama ibadah haji. Ini termasuk latihan ringan dan sosialisasi. Ini mencakup:

    - 1) Mengimbau calon jemaah untuk melakukan aktivitas fisik yang disarankan untuk meningkatkan daya tahan tubuh sebelum keberangkatan.
    - 2) Edukasi mengenai pentingnya hidrasi yang cukup, pola makan sehat, serta mengelola stres selama perjalanan ibadah haji.
  - d. Pemantauan kesehatan selama pelaksanaan haji

untuk menjamin ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai untuk jemaah haji, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Saudi Arabia. Perawatan dan pemantauan kesehatan akan dilakukan di sejumlah lokasi strategis, seperti:

    - 1) Rumah sakit haji dan klinik-klinik di tanah suci.
    - 2) Tim medis yang terdiri dari dokter dan tenaga kesehatan yang siap menangani berbagai masalah kesehatan yang muncul selama pelaksanaan ibadah haji.
    - 3) Pemantauan kondisi kesehatan secara berkala, termasuk penanganan darurat apabila diperlukan.

---

<sup>49</sup> Syahbudi, "Standar Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Rangka Penetapan Status Istiha'ah Kesehatan Jemaah Haji 2023," kementerian agama kota batam, 2023.

e. Penyuluhan kesehatan di tanah suci

Selain memberikan instruksi sebelum keberangkatan, jemaah yang sudah berada di Tanah Suci juga diberi nasihat tentang cara menjaga kesehatan dan mengidentifikasi tanda-tanda penyakit. Mereka juga diingatkan tentang cara menghindari kondisi medis yang berbahaya, seperti kekurangan air, kelelahan, atau penyakit yang disebabkan oleh cuaca ekstrem.

f. Pembatasan bagi calon jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu

Tidak diizinkan untuk melaksanakan ibadah haji bagi calon jemaah yang memiliki kondisi medis yang serius atau tidak dapat memenuhi kriteria istihah. Ini dilakukan untuk menghindari masalah kesehatan yang dapat mengancam keselamatan mereka selama ibadah.

g. Fasilitas kesehatan di lokasi ibadah

Di tempat-tempat ibadah, seperti Masjidil Haram dan Arafah, ada pos kesehatan yang membantu jemaah haji menangani keluhan atau masalah kesehatan mereka. Pos-pos ini juga siap memberikan pertolongan pertama dan mengarahkan mereka ke rumah sakit jika diperlukan.

Oleh karena itu, pengurangan ini dilakukan untuk memastikan semua calon jemaah haji memiliki kondisi kesehatan terbaik sebelum berangkat dan menjalani ibadah haji dengan aman dan nyaman di Tanah Suci.

## **2. Relevansi Rekomendasi Mudzakah Perhajian 2023 dengan Tantangan Kontemporer Penyelenggaraan Haji**

Rekomendasi mudzakah perhajian 2023 memiliki relevansi yang sangat penting dengan tantangan kontemporer dalam penyelenggaraan haji. Mudzakah perhajian merupakan forum diskusi yang melibatkan berbagai pihak terkait dalam penyelenggaraan ibadah haji, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, dan para ahli dengan tujuan menghasilkan rekomendasi yang dapat memperbaiki sistem dan tata kelola haji di

Indonesia. Beberapa rekomendasi yang dihasilkan dalam mudzakah perhajian 2023 secara langsung menanggapi tantangan-tantangan kontemporer dalam pelaksanaan ibadah haji. Berikut beberapa tantangan kontemporer dalam penyelenggaraan haji dan bagaimana rekomendasi mudzakah perhajian 2023 relevan dalam menghadapinya:

a. Keterbatasan kuota dan peningkatan jumlah jemaah

Salah satu masalah utama dalam penyelenggaraan haji adalah kuota yang terbatas yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi. Ini menyebabkan antrian panjang bagi calon jemaah haji Indonesia, dan jumlah jemaah haji yang terus meningkat menambah masalah logistik dan akomodasi. Tantangan tersebut relevan dengan rekomendasi mudzakah perhajian 2023 yang menekankan pentingnya efisiensi dalam pemberangkatan jemaah, dengan mempertimbangkan faktor kuota dan ketersediaan fasilitas. Misalnya dengan memperkenalkan teknologi untuk sistem pendaftaran dan keberangkatan yang lebih terorganisir dan tepat waktu, serta perluasan kerja sama dengan Arab Saudi dalam hal kuota haji, serta pencarian solusi terkait pembagian kuota yang lebih adil dan merata.

b. Tantangan kesehatan jemaah, terutama lansia

Tantangan sebagian besar jemaah haji Indonesia adalah lansia, yang rentan terhadap masalah kesehatan selama pelaksanaan ibadah haji, seperti kelelahan, dehidrasi atau penyakit kronis serta kondisi pasca pandemi dan ancaman kesehatan lainnya turut menambah tantangan dalam menjaga kesehatan jemaah haji. Tantangan ini relevan dengan rekomendasi mudzakah perhajian 2023 yang merekomendasikan penguatan program haji ramah lansia dengan fasilitas kesehatan yang lebih baik dan tenaga medis yang memadai. Terdapat pula penguatan pemeriksaan kesehatan secara lebih menyeluruh sebelum keberangkatan, serta penyuluhan kesehatan agar jemaah dapat menjaga kondisi tubuh dengan baik sebelum dan selama di Tanah Suci. Rekomendasi lainnya yakni dengan meningkatkan

fasilitas kesehatan di lokasi haji dengan layanan yang responsif terhadap kebutuhan jemaah lansia dan jemaah dengan kondisi medis tertentu.

- c. Penyelenggaraan ibadah haji yang aman dan nyaman pasca pandemi  
Tantangan pasca pandemi COVID 19 memberi dampak signifikan terhadap pelaksanaan ibadah haji, dengan pembatasan yang ketat dan perhatian besar terhadap protokol kesehatan serta keamanan jemaah, baik dari segi fisik maupun kesehatan, menjadi perhatian utama. Rekomendasi yang dikeluarkan dalam mudzakah perhajian 2023, disarankan untuk terus mengadaptasi kebijakan protokol kesehatan yang ketat bahkan setelah pandemi guna memastikan keselamatan jemaah, termasuk vaksinasi, penggunaan masker dan menjaga jarak di kerumunan. Juga disarankan untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi digital dalam manajemen haji, seperti aplikasi untuk pemantauan kesehatan jemaah, sistem informasi untuk jemaah dan pengawasan yang berbasis teknologi.
- d. Infrastruktur dan akomodasi  
Tantangan selanjutnya yakni keterbatasan infrastruktur dan fasilitas yang memadai, seperti penginapan, transportasi dan fasilitas ibadah, menjadi tantangan besar bagi kelancaran pelaksanaan haji terutama dengan jumlah yang besar. Rekomendasi mudzakah perhajian 2023 menganjurkan peningkatan kualitas infrastruktur, baik di tanah Suci maupun fasilitas pendukung di Indonesia. Mudzakah perhajian 2023 juga merekomendasikan penguatan sistem logistik dan akomodasi, misalnya dengan memprioritaskan akomodasi yang ramah bagi lansia dan jemaah kebutuhan khusus. Serta melakukan penyusunan rencana pengaturan transportasi yang lebih efisien, dengan mengutamakan kenyamanan dan keselamatan jemaah, serta memanfaatkan teknologi dalam pengaturan keberangkatan dan pemantauan pergerakan jemaah.

e. Pengelolaan keuangan dan transparansi

Tantangan pengelolaan dana haji yang transparan dan efisien merupakan isu penting mengingat biaya haji yang cukup besar dan terjadinya permasalahan terkait transparansi dalam pengelolaan dana yang sering menjadi sorotan masyarakat. Rekomendasi mudzakah 2023 relevan antara lain mencakup penguatan transparansi dalam pengelolaan dana haji dengan lebih banyak melibatkan pihak yang independen dalam audit keuangan serta penggunaan teknologi untuk meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan dalam proses keuangan haji juga menjadi salah satu rekomendasi yang diperkuat agar para jemaah dan masyarakat mendapatkan laporan yang jelas mengenai penggunaan dan haji.<sup>50</sup>

f. Pemberdayaan teknologi dan digitalisasi

Seiring dengan perkembangan zaman, penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan haji harus semakin dimaksimalkan untuk efisiensi dan kemudahan pelayanan menjadi tantangan dalam pemberdayaan teknologi dan digitalisasi. Mudzakah perhajian 2023 merekomendasikan implementasi sistem berbasis teknologi untuk mempermudah pendaftaran pemantauan kesehatan, manajemen akomodasi, serta peningkatan kualitas layanan selama haji. Kemudian rekomendasi penggunaan aplikasi digital untuk memantau kondisi jemaah, memberikan informasi real time, serta kemudahan dalam berkomunikasi antara petugas dan jemaah.

Dengan demikian, rekomendasi mudzakah perhajian 2023 sangat berkaitan dengan masalah penyelenggaraan haji saat ini, terutama terkait dengan peningkatan jumlah jemaah, pembatasan kuota, masalah kesehatan jemaah, dan kebutuhan akan teknologi. Ada peningkatan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan, dan penggunaan teknologi. Diharapkan

---

<sup>50</sup> BPKH, "Laporan Haji 2023," Badan Pengelola Keuangan Haji, 2023.

dapat mengatasi masalah-masalah ini dan meningkatkan pelaksanaan haji di masa depan. Meskipun banyak rekomendasi yang memerlukan upaya dan koordinasi yang intens dari berbagai pihak, efek yang dihasilkan, seperti peningkatan kenyamanan, keselamatan, dan kepuasan jemaah, akan sangat besar. Keberhasilan implementasi rekomendasi ini bergantung pada kesiapan pihak terkait untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman, teknologi, dan meningkatkan sistem pelayanan secara menyeluruh.

### **3. Kendala Penerapan Rekomendasi Mudzakah Perhajian 2023**

Penerapan rekomendasi mudzakah perhajian 2023 dilakukan guna meningkatkan penyelenggaraan haji di Indonesia yang mengalami kendala, meskipun demikian, salah satu tujuan dari rekomendasi tersebut adalah untuk mengatasi masalah yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji. Ada beberapa komponen yang mempengaruhi implementasi yang efektif dan efisien. Berikut adalah beberapa kendala utama yang dapat dihadapi dalam penerapan rekomendasi tersebut:

#### **a. Keterbatasan kuota haji dari pemerintahan Arab Saudi**

Salah satu kendala terbesar adalah kuota haji yang dibatasi oleh pemerintah Arab Saudi. Setiap negara, termasuk Indonesia hanya mendapatkan kuota tertentu untuk memberangkatkan jemaah haji setiap tahunnya. Pada 2023 meskipun kuota telah kembali normal pasca pandemi covid 19, masih ada keterbatasan dalam jumlah jemaah yang bisa diberangkatkan.<sup>51</sup>

#### **b. Keterbatasan sumber daya dan infrastruktur kesehatan**

Meskipun rekomendasi untuk penguatan fasilitas kesehatan dan program haji ramah lansia sudah sangat relevan, pelaksanaannya memerlukan sumber daya media yang besar, baik di Tanah Suci maupun di Indonesia. Fasilitas media di Arab Saudi, khususnya di Makkah dan Madinah, harus diperkuat, namun infrastruktur media yang

---

<sup>51</sup> BPKH.....Ibid

ada saat ini seringkali tidak mencukupi untuk melayani jumlah jemaah haji yang besar, terutama lansia dengan kondisi medis khusus.<sup>52</sup>

c. Adaptasi terhadap teknologi dan infrastruktur digital

Penerapan teknologi digital dalam manajemen haji seperti penggunaan aplikasi kesehatan, sistem pendaftaran berbasis digital, dan pengawasan berbasis teknologi, menghadapi kendala dari segi aksesibilitas dan kemampuan digital baik di kalangan petugas maupun jemaah haji serta banyak jemaah terutama lansia yang tidak terbiasa dengan penggunaan teknologi, sehingga adopsi sistem berbasis aplikasi dan digital akan memerlukan pelatihan khusus dan pendekatan yang lebih hati-hati.

d. Pengelolaan akomodasi dan transportasi

Pengelolaan akomodasi dan transportasi yang efisien masih menjadi tantangan besar, terutama dengan jumlah jemaah yang sangat banyak. Di Tanah Suci, hotel dan penginapan seringkali tidak dapat memenuhi kebutuhan semua jemaah, dan transportasi yang tersedia belum selalu ramah lansia atau jemaah dengan kebutuhan khusus.

e. Keterbatasan anggaran dan pembiayaan

Banyak Rekomendasi yang memerlukan anggaran besar, seperti peningkatan kualitas layanan kesehatan, fasilitas akomodasi, dan penggunaan teknologi. Namun keterbatasan anggaran dari pemerintah Indonesia, terutama yang terkait dengan pengelolaan dana haji, dapat membatasi kemampuan untuk melaksanakan rekomendasi tersebut secara maksimal.

f. Kompleksitas koordinasi antara berbagai pihak

Ada banyak pihak yang terlibat dalam menyelenggarakan ibadah haji, seperti Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Arab Saudi, dan organisasi masyarakat. Koordinasi anatara berbagai instansi ini

---

<sup>52</sup> Abdullah Syaer, "Arab Saudi Ministry of Hajj and Umrah," Syuhuf Saudi , 2023.

seringkali rumit, apalagi dengan adanya perbedaan kebijakan dan regulasi.

Penerapan Rekomendasi Mudzakah Perhajian 2023 menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan kuota, sumber daya manusia, hingga pengelolaan anggaran. Meskipun demikian, dengan upaya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah Indonesia, pihak Arab Saudi, dan berbagai lembaga terkait, serta penggunaan teknologi yang lebih efisien, banyak dari kendala ini dapat diatasi. Keberhasilan dalam mengatasi kendala-kendala ini akan sangat berpengaruh pada penyelenggaraan haji yang lebih baik dan lebih ramah bagi seluruh jemaah.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai Mitigasi Penyelenggaraan Haji: Kajian Terhadap Rekomendasi Mudzakah Perhajian di Indonesia. Mitigasi penyelenggaraan haji merupakan langkah strategis untuk menghadapi berbagai tantangan yang muncul selama pelaksanaan ibadah haji, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan, logistik, keamanan, dan pelayanan kepada jemaah. Dalam hal ini, Mudzakah Perhajian yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) memiliki peran penting dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang relevan dan efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Berdasarkan pembahasan yang sudah di kaji sebelumnya, berikut beberapa kesimpulan yang data ditarik sebagai berikut:

1. Mitigasi penyelenggaraan haji 2023 yang dilakukan oleh kementerian Agama RI antara lain dengan menyiapkan 4.421 petugas jemaah haji serta melakukan pematangan layanan program Haji Ramah Lansia. Yang meliputi kegiatan: penyusunan kriteria dan kuota lansia, fasilitas khusus lansia, pendampingan lansia, pendekatan prioritas dalam ibadah, sosialisasi dan pelatihan untuk lansia, perhatian khusus pada kesehatan, penyuluhan tentang prosedur haji, dan penggunaan teknologi. Adapun dalam hal istihah kesehatan selama penyelenggaraan haji 2023, ini adalah beberapa langkah mitigasi yang diterapkan diantaranya: pemeriksaan kesehatan pra-keberangkatan, sertifikasi kesehatan, pembinaan kesehatan dan penguatan fisik, pemantauan kesehatan selama pelaksanaan haji, penyuluhan kesehatan di tanah suci, dan pembatasan bagi calon jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Pengurangan ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap calon jemaah haji memiliki kondisi kesehatan ideal sebelum berangkat, sehingga mereka dapat menjalani ibadah haji dengan aman dan nyaman di Tanah Suci.
2. Rekomendasi mudzakah perhajian 2023 memiliki relevansi yang sangat penting dengan tantangan kontemporer dalam penyelenggaraan haji. Rekomendasi mudzakah perhajian 2023 sangat berkaitan dengan masalah penyelenggaraan haji saat ini, terutama terkait dengan peningkatan jumlah jemaah, pembatasan kuota, masalah kesehatan jemaah, dan kebutuhan akan teknologi. Ada peningkatan

infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan, dan penggunaan teknologi. Diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah ini dan meningkatkan pelaksanaan haji di masa depan. Meskipun banyak rekomendasi yang memerlukan upaya dan koordinasi yang intens dari berbagai pihak, efek yang dihasilkan, seperti peningkatan kenyamanan, keselamatan, dan kepuasan jemaah, akan sangat besar. Keberhasilan implementasi rekomendasi ini bergantung pada kesiapan pihak terkait untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman, teknologi, dan meningkatkan sistem pelayanan secara menyeluruh.

3. Penerapan rekomendasi Mudzakah Perhajian 2023 menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan kuota, infrastruktur, teknologi, anggaran, dan koordinasi. Namun, melalui peningkatan kolaborasi antar pihak terkait dan optimalisasi teknologi, tantangan ini dapat diatasi untuk mewujudkan penyelenggaraan haji yang lebih baik, efisien, dan inklusif bagi seluruh jemaah.

## **B. Saran**

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menyadari kekurangan selama melakukan penelitian ini. Dengan begitu, peneliti memiliki beberapa saran dalam penelitian ini:

1. Kementerian Agama

Bagi Kementerian Agama, agar melakukan peningkatan kualitas pelayanan kepada jemaah haji, seperti penyempurnaan manajemen, peningkatan fasilitas dan akomodasi, serta peningkatan koordinasi antara lembaga terkait khususnya permasalahan istihah kesehatan.

2. Kementerian Kesehatan

Bagi Kementerian Kesehatan, agar menyesuaikan acara yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti yang mengarah pada isu-isu penting terkait kebijakan kesehatan, serta mencakup peningkatan kualitas layanan kesehatan, penguatan sistem kesehatan masyarakat atau perbaikan program kesehatan yang sudah ada.

3. Peneliti Selanjutnya

Peneliti akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan melakukan survei kepuasan jemaah haji atau wawancara. Ini dapat membahas lebih mendalam dan lebih detail tentang mudzakah perhajian 2023.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Fawa'id Syadzili, M. Ali Yusuf, Abdul Jamil Wahab, Nahdlatul Ulama (NU). Community Based Disaster Risk Management (CBDRM). Project Manajemen Unit. *Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat Dalam Perspektif Islam*. Cet. 1. Jakarta : Project Management Unit Community Based Disaster Risk Management NU., 2007, n.d.
- Abdullah Abash. "Rekomendasi Mudzakah Perhajian Tahun 2023," 2023.
- Abdullah Syaer. "Arab Saudi Ministry of Hajj and Umroh." Syuhuf Saudi , 2023.
- Affandi, Yuyun. *Haji Bagi Generasi Milenial-Paradigma Tafsir Tematik*. Semarang: Fatawa Publishing, 2021.
- Ahmad Kartono. *Solusi Hukum Manasik Dalam Permasalahan Ibadah Haji Menurut Empat Mazhab*. Tangerang: Pustaka cendekiamuda, 2016.
- Annur, Cindy Mutia. "10 Negara Dengan Populasi Muslim Terbanyak Dunia 2023, Indonesia Memimpin!" databoks, 2023. [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia-memimpin#:~:text=RISSC mencatat%20jumlah populasi muslim,totalnya 277%20 juta jiwa](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia-memimpin#:~:text=RISSC%20mencatat%20jumlah%20populasi%20muslim,totalnya%20277%20juta%20jiwa).
- Anwar. "Penyakit Penyebab Tertinggi Jemaah Haji Wafat," June 2023.
- Aqiel Munawar. "Sistem Informasi Dan Komputerisasi Haji TerpaduAqiel," November 12, 2024.
- Asep Firmansyah. "Kemenag Gelar Mudzakah Bahas Tantangan Penyelenggaraan Ibadah Haji." antaranews.com. Accessed March 14, 2024. <https://www.antaranews.com/berita/3150673/kemenag-gelar-mudzakah-bahas-tantangan-penyelenggaraan-ibadah-haji>.
- Azis, Yusuf Abdhul. "Studi Pustaka: Pengertian, Tujuan, Sumber Dan Metode." deepublish store, 2023. <https://deepublishstore.com/blog/studi-pustaka/>.
- BPKH. "Laporan Haji 2023 ." Badan Pengelola Keuangan Haji, 2023.
- Burhanudin Mukhamad Faturahman. "KONSEPTUALISASI MITIGASI BENCANA MELALUI PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK" 3 (2019): 5–10.
- Cindy Mutia Annur. "Inilah 10 Negara Dengan Kuota Haji Terbanyak 2023, Indonesia Peringkat Teratas." databoks, 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/06/inilah-10-negara-dengan-kuota-haji-terbanyak-2023-indonesia-peringkat-teratas>.
- . "Jumlah Jemaah Haji Indonesia Didominasi Usia Di Atas 50-59 Tahun, Berikut Trennya Lima Tahun Terakhir." databoks, 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/19/jumlah-jemaah-haji-indonesia-didominasi-usia-di-atas-50-59-tahun-berikut-trennya-lima-tahun-terakhir>.
- Diposaptono, Subandono. *Sebuah Kumpulan Pemikiran: Mitigasi Bencana Dan Adaptasi Perubahan Iklim. Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia*. Direktorat Pesisir dan Lautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2011. [https://www.unisdr.org/files/1037\\_hyogoframeworkforactionenglish.pdf](https://www.unisdr.org/files/1037_hyogoframeworkforactionenglish.pdf).
- Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh. "Perketat Istiha'ah Kesehatan, Jemaah Haji Akan Jalani Pemeriksaan Fisik Dan Psikologis," 2023.
- Djohanputro, Bramantyo. "Manajemen Risiko Korporat," 2008, 43. [https://idfood.co.id/assets/uploads/document/MANAJEMEN\\_RISIKO\\_KORPORAT.pdf](https://idfood.co.id/assets/uploads/document/MANAJEMEN_RISIKO_KORPORAT.pdf).
- Fahham & Dwiarti. "Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI, Mudzakah Perhajian," 2023.
- Finaka. "Kuota Haji Indonesia Tahun Ke Tahun." Indonesiabaik.id. Accessed November 28,

2024. <https://indonesiabaik.id/infografis/kuota-haji-indonesia-tahun-ke-tahun>.
- Frisda Anintya, Veronika, Senja Rantika, Yasintha Fitriyani, Firsty Yusdanissa Arismunandar, and Sabila Zakiyah. "Evaluasi, Perubahan Dan Kontinuitas Kebijakan: Studi Kasus Kebijakan Pilkada Serentak 2020 Di Bandar Lampung." *Jurnal Studi Ilmu Sosial Dan Politik* 1, no. 1 (2021): 1–20. <https://doi.org/10.35912/jasispol.v1i1.160>.
- Hanafi, Mamduh M. *Modul Risiko, Proses Manajemen Risiko, Dan Enterprise Risk Management*. Universitas Terbuka, 2016.
- Hanindita, Hanung, and Ana Irhandayaningsih. "PERSEPSI PUSTAKAWAN PADA FUNGSI HUMAS DI PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI (Studi Kasus UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro)." *Jurnal Ilmu Perpustakaan* 6, no. 3 (2017): 261–70. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/view/23156>.
- Hasan Muarif Ambary. *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2020.
- Hughes, Rebecca. "Metode Penelitian." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2008): 287.
- Hukum dan Hak Asasi Manusia. "Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji." Kementrian Hukum, 2008.
- Iskandar. "Istiha'ah Kesehatan Haji." Kementrian Kesehatan, 2023.
- Kadji, Yulianto. *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan Dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas*. UNG Press Gorontalo, 2015.
- Kartono, Ahmad. *Solusi Hukum Manasik Dalam Permasalahan Ibadah Haji Menurut Empat Mazhab*. Jakarta: Pustaka Cendekiamuda., 2016.
- Lexy Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1998.
- Lisma Noviani. "Arti Mudzakarrah Adalah, Istilah Islam Yang Digunakan Dalam Musyawarah Atau Diskusi Berikut Jenisnya,." Accessed March 14, 2024. <https://sumsel.tribunnews.com/2023/01/03/arti-mudzakarrah-adalah-istilah-islam-yang-digunakan-dalam-musyawah-atau-diskusi-berikut-jenisnya>.
- Mustarini Bella Vitiara. "Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umroh: Permasalahan Haji Terus Berkembang, Mudzakarrah Perhajian Penting Digelar Setiap Tahun." Direktorat Jenderal penyelenggaraan Haji dan Umroh, 2023.
- Mustopadidjaja, A.R. "Beberapa Dimensi Dan Dinamika Kepemimpinan Abad 21," 2002.
- Nur lala khusyatillah. "Penyelenggaraan Ibadah Haji Ramah Lansia Tahun 2023 Di Kementerian Agama Kota Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah." IAIN syekh nurjati cirebon, 2024.
- Rohani Budi Prihatin. "Permasalahan Penyelenggaraan Haji 2023." *Jurnal Bidang Kesehatan Rakyat* 15, no. 13 (2023).
- Sanita, Meigitaria. "Masa Tunggu Haji Di Indonesia Mencapai 47 Tahun, Alhasil Usia Tua Mendominasi Hingga Ada Yang Terpaksa Dipulangkan." universitas Islam Indonesia, 2023. <https://communication.uii.ac.id/masa-tunggu-haji-di-indonesia-mencapai-47-tahun-alhasil-usia-tua-mendominasi-hingga-ada-yang-terpaksa-dipulangkan/#:~:text=Berdasarkan data dari Kemenag RI,yang datang ke Tanah Suci.>
- September 26. "Teknik Pengumpulan Data: Arti, Proses, Dan Jenis Data," 2022. <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/teknik-pengumpulan-data-arti-proses-dan-jenis-data/>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Super User. *REGULASI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA BESERTA ASAS-ASAS PEMBENTUKANNYA*. Edited by S.H Rahmi Herawati. pengadilan agama tanjung pati. Accessed March 4, 2024. <http://ebookregulasi.patanjungpati.go.id/index.php/66-halaman-depan/1-regulasi>.
- "Surah At-Taghabun 64 : 11." Accessed September 14, 2024. <https://www.quran->

wiki.com/ayat-64-11-atTaghabun.  
“Surah Yusuf 12 : 47.” Accessed September 14, 2024. <https://www.quran-wiki.com/ayat.php?sura=12&aya=47>.  
Syahbudi. “Standar Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Rangka Penetapan Status Istihah Kesehatan Jemaah Haji 2023.” kementerian agama kota batam, 2023.  
tempo.co. “DPR Ungkap Sejumlah Kekurangan Penyelenggaraan Haji 2022,” 2022. <https://nasional.tempo.co/read/1611710/dpr-ungkap-sejumlah-kekurangan-penyelenggaraan-haji-2022>.  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (n.d.).  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah (n.d.).